

**GENEALOGI KEKUASAAN TERHADAP  
KONTROVERSI NILAI KESEJARAHAN DALAM FILM  
JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**OLEH:**

**MUHAMMAD HAMDAN ZA'IMUDDIN**

**NIM: E91217095**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hamdan Za'imuddin

NIM : E91217095

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Genealogi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, bukan hasil plagiat kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 21 April 2022



Muhammad Hamdan Za'imuddin

NIM. E91217096

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Genealogi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara” yang ditulis oleh Muhammad Hamdan Za’imuddin ini telah disetujui pada tanggal 10 Februari 2022.

Surabaya, 10 Februari 2022

Pembimbing,



**Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum**

**NIP. 197905042009011010**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Genealogi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara” oleh Muhammad Hamdan Za’imuddin ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 14 April 2022

Tim Penguji

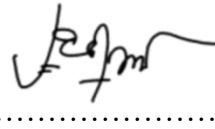
1. Muchammad Helmi Umam, M. Hum

  
:.....

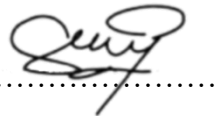
2. Dr. Suhermanto, M. Hum

  
:.....

3. Dr. Loekisno Choiril Warsito, M. Ag.

  
:.....

4. Syaifulloh Yazid, M. A

  
:.....

Surabaya, 22 April 2022

Dekan



**Prof. Dr. H. Kunawi Basyir, M. Ag.**

**NIP. 1964091819922031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hamdan Za'imuddin  
NIM : E91217095  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam  
E-mail address : mhamdanzaimuddin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Genealogi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan**

**Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara**

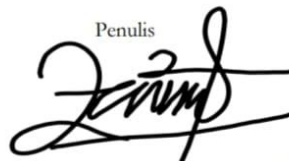
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 April 2022

Penulis

  
(Muhammad Hamdan Za'imuddin)  
*nama terang dan tanda tangan*

**GENEALOGI KEKUASAAN TERHADAP KONTROVERSI NILAI  
KESEJARAHAN DALAM FILM JEJAK KHILAFAH DI  
NUSANTARA**

**MUHAMMAD HAMDAN ZA'IMUDDIN (E91217095)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kontroversial dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara menjadi perbincangan di kalangan masyarakat tentang isu kekhilafahan di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini fokus pada bagaimana kontroversi nilai kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara dan bagaimana analisis genealogi kekuasaan Michel Foucault terhadap kontroversi nilai kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teori analisis Michel Foucault yang menekankan pada arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan yang bertujuan untuk menggali diskursus yang muncul dalam kontroversi Film Jejak Khilafah di Nusantara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengusung dan narasumber dalam film tersebut berasal dari kelompok para khilafers, sehingga bisa dikatakan merupakan sebuah promosi akan khilafah dan menjadikan negara ini sebagai negara khilafah. Selain itu, diusungnya Film Jejak Khilafah memunculkan pandangan atas unsur penerimaan maupun penolakan akan adanya khilafah yang masing-masing pilihan bermuatan kepentingan dan motif tertentu.

Kata Kunci: Film Jejak Khilafah di Nusantara, Arkeologi, Genealogi

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II.....	21
KAJIAN TEORITIS .....	21
A. Genealogi Kekuasaan Michel Foucault .....	21
1. Arkeologi Pengetahuan Michel Foucault .....	21
2. Genealogi Kekuasaan Michel Foucault .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Khilafah .....	36

1. Pengertian khilafah .....	36
2. Sejarah khilafah .....	37
C. Tinjauan Tentang Film.....	39
1. Pengertian Film.....	42
2. Pengertian Film Dokumenter .....	45
BAB III.....	49
GAMBARAN UMUM TENTANG FILM JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA.....	49
A. Profil Film Jejak Khilafah di Nusantara .....	49
B. Kontroversi Film Jejak Khilafah Di Nusantara .....	59
1. Pro Terhadap Film Jejak Khilafah Di Nusantara.....	59
2. Kontra Terhadap Film Jejak Khilafah Di Nusantara .....	63
BAB IV .....	76
Genealogi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara .....	76
A. Analisis Arkeologis Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara .....	76
B. Analisis Genealogis Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara .....	88
BAB V.....	95
PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	98



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena yang berkaitan tentang khilafah pada akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan publik. Hal ini bisa kita ketahui dari banyaknya forum diskusi, seminar, pengajian, dan lainnya yang mengadakan kajian tentang masalah konsep khilafah yang tentu saja membuat publik menjadi tidak asing serta sering membicarakan tentang khilafah di dalam kehidupan sehari-harinya.

Di negara tanah air Indonesia sendiri, semenjak era reformasi yang diberikan kebebasan berpendapat, nampak berbagai banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak negara yakni munculnya isu-isu terkait dengan khilafah yang saat ini ramai dibicarakan dalam kalangan masyarakat. Pembahasan mengenai wacana tentang khilafah semakin hari semakin bebas disuarakan baik itu berupa opini maupun gerakan-gerakan dalam bentuk nyata.

Di era sekarang, media sosial menjadi salah satu fokus sasaran dari berbagai macam diskusi termasuk tentang khilafah. Hal ini karena semua aktivitas masyarakat modern saat ini tidak bisa dilepaskan dengan dunia teknologi. Dalam hal media sosial ini para penggiat khilafah berusaha menakutkan masyarakat lewat media sosial bahwa sistem khilafah

merupakan satu-satunya solusi yang paling tepat untuk menggantikan sistem pemerintahan yang ada di tanah air Indonesia.<sup>1</sup>

Sistem khilafah merupakan sistem pemerintahan yang mempunyai khas dengan pemerintahan yang berlaku dan sesuai bagi umat Islam di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syari'at Islam. Sistem khilafah membawa dakwah Islam sampai ke seluruh dunia. Sistem pemerintahan Khilafah sangat berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya seperti monarki, federasi, kekaisaran, maupun republik. Sedangkan di Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang menganut sistem Eropa kontinental atau *civil law*.<sup>2</sup> Oleh karena itu sistem pemerintahan Khilafah tidak cocok diterapkan di Indonesia karena Indonesia dihuni oleh penduduk yang majemuk, bukan penduduk yang muslim saja.

Penjelasan di atas menjadi pengunci mati bahwa di dalam sistem pemerintahan Indonesia bahwa tidak ada hak untuk memaksakan ide khilafah untuk menjadi sistem pemerintahan NKRI. Sekalipun demikian masih saja secara terang-terangan terdapat oknum atau anggota yang menginginkan untuk menggiring opini masyarakat dengan mengatakan bahwasanya konsep atau ide tentang khilafah masih harus diperjuangkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Azizul Ghofar, *Salah Kaprah Khilafah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), 5

<sup>2</sup> Indra Utama Tanjung, "Studi Komparatif Pendirian Negara Khilafah di Indonesia", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 1, (2018), 116

dengan melakukan kerancuan berpikir yang di sebut dengan *selective evidence*, yaitu memilih argumen tertentu untuk mendukung hipotesisnya.<sup>3</sup>

Pada zaman teknologi masa kini mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi dari berbagai penjuru bumi. Dalam hal ini media pun menjadi semakin maju dan berkembang karena terlihat adanya media elektronik yang dapat menunjukkan sesuatu yang sangat menarik dari pada media yang menunjukkan hanya sekedar sebuah tulisan. Media yang elektronik menampilkan kepada masyarakat tentang sesuatu atau hal-hal yang bersifat audio maupun audio visual yakni seperti film layar lebar dan televisi.<sup>4</sup> Adapun media elektronik yang sangat menarik perhatian masyarakat adalah sebuah film. Seringkali film ditonton untuk menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi masyarakat. Akan tetapi film juga mempunyai fungsi yang sebenarnya antara lain fungsi informatif, edukatif, dan juga persuasif.

Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa dapat membuat masyarakat lebih mudah untuk mencari film yang dikehendaki untuk di tonton salah satunya lewat aplikasi YouTube di *playstore* maupun *appstore*. Dalam pembahasan kali ini peneliti akan membahas salah satu film mengandung kontroversi yang ada di YouTube yaitu film dokumenter berjudul “Jejak Khilafah di Nusantara”.

---

Ainur Rofiq Al Amin, “Konstruksi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 07, No. 02, (2017), 27

Amar Ahmad, “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar revolusi dan Berbagai Standardnya”, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2012), 138

Dalam akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan oleh film tersebut yang merupakan karya Nicko Pandawa, sutradara film dokumenter ini dan alumnus Sejarah Peradaban Islam yang menyajikan sejarah Islam yang kredibel lewat film dokumenter yang diangkat dari skripsinya. Akan tetapi film Jejak Khilafah di Nusantara tersebut yang ditayangkan perdana pada tanggal 20 Agustus 2020 menuai banyak pro dan kontra oleh masyarakat, lantaran film tersebut mencantumkan nama dan argumen sejarawan terkenal yaitu Peter Carey guna memperkuat bukti bahwa pernah ada sistem Khilafah di Nusantara.

Adapun isi film dokumenter tersebut dibuka dengan teks mengklaim diri sebagai “Sebuah Film yang akan mengupas sejarah Islam di Nusantara bersama para sejarawan”. Narasi dalam film ini dimulai dari kisah wafatnya Rosulullah Muhammad SAW yang direspon umat Islam di sekelilingnya dengan segera bermusyawarah untuk mencari pengganti Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa Rasulullah wafat, narasi film ini berlanjut ke sejarah berbagai kekhalifahan Islam terakhir yaitu kekhalifahan Utsmani yang masanya berdurasi sekitar 1.300 tahun. Lalu, narasi setelahnya di lanjut ke pernyataan deduktif bahwa khilafah bukanlah hal yang baru di wilayah Nusantara dengan bukti ada pada hubungan antara kesultanan Islam di Nusantara dengan Kekhalifahan yang ada di Turki Utsmani sejak abad ke 7. Dari sinilah inti ceritanya dalam film tersebut yaitu mencari bukti hubungan kekhalifahan Turki Utsmani dengan Kesultanan Islam di Nusantara.

Sejak pertama kali ditayangkan film ini memang mengundang antusiasme yang begitu luar biasa dari masyarakat, hal ini dapat dibuktikan pada saat film tersebut ditayangkan secara live di media sosial Youtube telah ditonton oleh 63 ribu orang, namun beberapa saat kemudian link yang dibagikan untuk menonton film tersebut secara tiba-tiba tidak dapat diakses. Hal ini lantaran adanya keluhan hukum dari pemerintah. Akun Ade Jawabi kemudian mengunggah ulang film tersebut menggunakan judul yang berbeda, tetapi hasilnya tetap saja tidak ada perubahan, link film tersebut masih tetap tidak dapat diakses. Akibat terjadinya pemblokiran tersebut pemerintah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Teuku Zulkarnain yang pada waktu itu menjadi bagian dari Wasekjen MUI meminta kepada Presiden memberikan alasan mengapa film tersebut diblokir penayangannya.

Selain mendapatkan dukungan dari masyarakat yang pro dalam penayangan film tersebut, disisi lain juga melahirkan banyak kontra ataupun dari masyarakat terutama ahli sejarah, karena dalam film dokumenter tersebut menceritakan bahwa Khilafah Islamiyah yang dahulu pernah ada dan berpusat di Turki terdapat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nusantara. Hubungan itu telah ada sejak masa Khalifah Utsmaniyah dengan Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa. Sejarawan Inggris bernama Peter Carey merupakan salah satu yang kontra dengan film tersebut dan namanya dicatut dalam *launching*-nya film ini adalah

sejarawan yang mempunyai karya ilmiah berupa penelitian yang fokus pada perang Jawa dan Pangeran Diponegoro.

Peter Carey mengkritik dan membantah film tersebut bahwa adanya hubungan antara kekhalifahan Utsmaniyyah dan Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa seperti cerita yang ada di film tersebut. Film Jejak Khilafah di Nusantara ini di anggap Peter Carey sebagai film yang terkesan di paksakan. Peter Carey memastikan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan tersebut dan jejak Khilafah itu tidak ada di Nusantara.

Dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik membahas dan mencoba membedah tentang sebuah film tersebut yang mengandung kontroversi melalui analisis Michel Foucault yang meliputi analisis genealogi kekuasaan dan arkeologi pengetahuan. Karena analisis genealogi Kekuasaan menyelidiki terhadap wacana yang muncul dengan menganalisis hubungan antara kuasa dengan wacana. Sedangkan teori arkeologi pengetahuan membantu peneliti untuk menyelam atau menggali lebih dalam sehingga kita tahu akar dari bumi pengetahuan dan diskursus dalam sejarah. Maka dari itu, kekuasaan terhubung melalui sebuah pengetahuan dan pengetahuan akan membawa dampak pada sebuah kekuasaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk menjawab beberapa persoalan penting dalam kajian tersebut, yaitu:

1. Bagaimana kontroversi nilai kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara?
2. Bagaimana analisis genealogi kekuasaan Michel Foucault terhadap kontroversi nilai kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kontroversi nilai kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara
2. Untuk mengetahui analisis genealogi kekuasaan Michel Foucault terhadap kontroversi nilai kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan tentang sejarah Khilafah dan apakah ada hubungan dengan Nusantara serta perlukah Khilafah dijadikan sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa menjadi nilai dan manfaat serta sebagai rujukan bagi penelitian pada masa

yang akan datang, khususnya dalam studi Aqidah dan Filsafat Islam dan Studi dalam bidang Sejarah Peradaban Islam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman atau informasi baru dan kontribusi secara luas kepada masyarakat tentang sejarah di Film Jejak Khilafah di Nusantara,

Penelitian ini juga bermanfaat bagi para penggemar dunia perfilman baik di televisi maupun di media sosial terutama di media sosial You Tube agar lebih berhati-hati ketika menonton sebuah film yang mengandung keilmuan atau edukasi sejarah, karena bahaya sekali jika sebuah sejarah di buat palsu. Diharapkan juga dapat dijadikan acuan bahwa teori dari Michel Foucault yaitu arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan sangat penting sekali untuk membuktikan pengetahuan yang sebenarnya, terutama dalam menyelidiki pengetahuan dan kuasa yang berkaitan dengan sejarah.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa rujukan atau acuan dari penelitian terdahulu dengan tujuan memperkuat penelitian ini. Adapun rujukan-rujukan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jurnal	Judul Artikel	Hasil Penelitian
1.	Alaika M. bagus kurnia ps, Abdurrohman wahid, dan Gaung perwira	Jurnal Islamika: Jurnal ilmu-ilmu Keislaman	“Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia”	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa menerapkan sistem khilafah di Indonesia banyak menuai kontroversi



	yustika			karena kita tahu bahwa Indonesia adalah Negara yang ditempati oleh beragam agama bukan hanya agama islam saja. Oleh karena itu jika sistem tersebut diterapkan di Indonesia adalah Sesutu yang tidak mungkin alias mustahil dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia.
2.	Nevi Anggraeni	Skripsi/ Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam/ UIN Sunan Ampel Surabaya/ 2019	“Analisis Wacana Kritis Cyberbulliyin g pada Film “Hanum dan Rangga” di Media Sosial”	Penelitian ini membahas tentang sebuah Film yang ada di media Sosial. Film tersebut adalah Film Hanum dan Rangga yang menuai banyak komentar publik, karena film ini terdapat tragedi <i>cyberbulliyin</i> . <i>Cyeberbulliyin</i> dalam film ini tidak lepas dari penulis novelnya yakni

				<p>Hanum Salsabiela Rais. Hal ini menyebabkan sebagian besar banyak netizen melakukan tindakan <i>cyberbullying</i> kepada Hanum, karena hanum ikut terlibat dalam kasus hoax Ratna Sarumpaet. Hal ini dikarenakan terdapat kebohongan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana Michel Foucault.</p>
3	Zahrotus Sa'idah	Jurnal Representamen	<p>“Preferensi Kesalehan Wanita dalam Film Religi (Studi Analisa Framing Terhadap Film Khalifah karya Nukman Hakim)”</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas dan menganalisis sebuah film religi yang mendapatkan respon kritikan pro dan kontra. Film tersebut merupakan film karya Nukman Hakim dengan judul Khalifah. Dalam film ini kesalahannya adalah pengarang</p>

				mempresentasikan wanita yang bercadar kesalahan lainnya adalah pengarang membingkai tragedi bom bunuh diri oleh kelompok teroris.
4	Umi Halwati	AT-TABSYIR (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam)	“Analisis Foucault dalam membedah wacana teks dakwah di media massa”	Dalam penelitian ini membahas tentang wacana teks dakwah di dalam media massa yang menggunakan analisis Foucault. Dengan mediator atau alat seperti media massa akan semakin efektif dalam hal mempublikasikan suatu ideologi baik pro maupun kontra terhadap suatu diskursus. Hal ini mengakibatkan perang wacana khususnya perang wacana dakwah yang tidak bisa dihindari. Sehingga perlunya menganalisis untuk

				<p>teks teks wacana dakwah di media massa. Dalam penelitian ini analisis yang paling cocok di gunakan adalah dengan menggunakan analisisnya Foucault yakni arkeologi dan genealogi pengetahuan.</p>
5	Indra Utama Tanjung	Jurnal Penelitian Medan Agama	“Studi Komparatif pendirian Negara Khilafah di Indonesia”	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan konsep pendirian khilafah yang di jelaskan dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Sehingga penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa sistem khilafah adalah bukan syari’at akan tetapi sistem khilafah ini cocok jika didirikan di zamannya yaitu sistem model kerajaan dan sistem model kesultanan.</p>

6	Ainur Rofiq Al Amin	Jurnal Review Politik	“Konstruksi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir”	<p>Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang persoalan konstruksi sistem Khilafah. Dan peneliti membuktikan bahwa sistem khilafah oleh Hizbut Tahrir yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak terpisahkan adalah klaim yang salah.</p>
7	Arthur Aritonang	Jurnal Teologi dan Kependidikan	“Roh Hizbut Tahrir di Bumi Pancasila”	<p>Dalam penelitian ini ingin mengkaji tentang organisasi yang selalu berambisi untuk merealisasikan sitem khilafah di Bumi Pancasila. Dalam Penelitian juga terdapat relevansi dengan film Jejak Khilafah di Nusantara karena pembuatan film tersebut ingin melakukan</p>

				<p>propaganda politik seakan akan bahwa kejayaan Islam di masa lalu misal utsmaniyyah mempunyai akar historis di Nusantara sehingga banyak muslim yang pada akhirnya mengikuti ideologi HTI tersebut padahal film tersebut tidak memiliki bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan melalui arsip Peter Carey.</p>
8	Abdil Mughis Mudhofir	Jurnal Sosiologi	Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik	<p>Dalam penelitian ini membahas konsep ini dalam pemikiran Foucault tentang kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya.</p>
9	Hermawan	Belajar	Kekuasaan	<p>Dalam penelitian ini</p>

	Septian Abadi	Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Seksualitas dalam novel: Perspektif analisis wacana kritis Michel Foucault	membahas tentang konsep kekuasaan seksualitas dengan menggunakan pendekatan genealogi kekuasaan Michel Foucault. Adapun tujuan dalam penelitian itu untuk membedah hubungan dan efek yang muncul dari relasi setiap wacana kekuasaan seksualitas dalam novel yang berjudul Kremil. Hal ini sangat relevan pada penelitian penulis bahwa penulis akan membedah hubungan relasi kuasa dan pengetahuan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara dengan menggunakan Genealogi Kekuasaan Michel Foucault.
10	Nurul Rizki Fitriyah dan	Jurnal Mahasiswa	Perang Diskursus	Dalam penelitian ini membahasa tentang

	Farid Pribadi	Unesa	Muslimah Feminis Di Instagram	wacana tentang muslimah feminis yang muncul dalam media sosial Instagram yang memprogandakan nilai-nilai suatu kelompok sehingga menimbulkan perang diskursus antara komentar yang pro dan kontra. Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini itu menggunakan arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan Michel Foucault. Hasil dalam peneltian ini yakni aliran tersebut menawarkan penggunaan agama (ayat-ayat al-Qur'an), nilai, dan ideologi sebagai alat untuk melawan patriarki.
11	Evi Marlina	Jurnal	Genealogi	Dalam penelitian ini



	Harahap	Bahasa Indonesia Prima	Wacana Foucault Terhadap Kumpulan Cerpen “Protes” Karya Putu Wijaya	membahas sebuah karya sastra dari kumpulan buku cerpen “Protes” (1994) milik Putu Wijaya melalui metode genealogi kekuasaan Michel Foucault. Dalam penelitian ini menemukan bahwa cerpen yang dianalisis tersebut semuanya mengandung alat-alat untuk mendukung strategi kekuasaan dan kekuasaan itu dijadikan sebagai latar belakang Cerpen tersebut untuk menyampaikan wacana Putu Wijaya mengenai moralitas.
--	---------	------------------------------	--	---

## F. Metode Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan mencoba meneliti dengan menggunakan metode-metode analisis yang sudah ada dan sesuai

dengan isu yang akan diteliti. Metodologi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam kajian isu di atas peneliti akan menggunakan metode analisis-kualitatif. Adapun pengertian dari kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami sebuah fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti tindakan, persepsi, perilaku dan lain sebagainya secara berhubungan.<sup>5</sup> Dalam hal ini penelitian memanfaatkan sumber data kepustakaan yang meliputi, jurnal, buku, skripsi dan berbagai sumber data lain yang sesuai dengan penelitian ini.

### 2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dari Skripsi ini dapat dibagi menjadi dua: yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah film dari akun Youtube Khilafah Channel yang berjudul Jejak Khilafah di Nusantara dengan observasi beberapa media yang pro dan kontra terhadap kontroversi adanya film tersebut. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu kajian kepustakaan yakni dokumen atau buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

### 3. Pendekatan dan Metode Analisis Data

---

<sup>5</sup> Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6

Dalam penelitian tersebut, peneliti akan menggunakan pendekatan analisis arkeologi dan genealogi Michel Foucault karena peneliti akan membedah atau membongkar isi sejarah dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara. Sedangkan untuk analisis data, dalam meneliti isu terkait judul di atas, peneliti akan menggunakan teori analisis Michel Foucault, karena peneliti akan mencoba memberikan pemahaman terhadap kontroversi nilai kesejarahan dalam film tersebut melalui genealogi kekuasaan Michel Foucault.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Berikut merupakan rancangan penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam setiap bab, yaitu:

Pada bab *pertama*, penulis akan memberikan penjelasan panduan awal serta pengantar bagi pembaca, supaya pembaca dapat memahami apa yang dikehendaki oleh penulis. Bab pertama ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Pada bab *kedua*, berisi penjelasan tentang kajian teori yang akan digunakan peneliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori analisis genealogi kekuasaan dan arkeologi pengetahuan Michel Foucault. Karena genealogi kekuasaan adalah suatu proses yang bisa mengungkapkan jejak atas pengaruh kekuasaan terhadap sebuah kebenaran, sedangkan arkeologi pengetahuan Michel Foucault merupakan metode riset dan analisis sejarah yang sangat dikembangkan

dan dialami oleh Michel Foucault sendiri. sehingga cocok untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa wacana yang berkaitan dengan pengetahuan sejarah. Tujuan dari arkeologi pengetahuan sejarah itu sendiri untuk mengetahui analisis kearsipan suatu teks, terutama arsip tentang sejarah yang ada di Film Jejak Khilafah di Nusantara.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran umum Film Jejak Khilafah di Nusantara, kontroversi dalam film tersebut, serta kritik Peter Carey yang ingin meluruskan kesalahan dalam sejarah khilafah di Nusantara dalam film tersebut.

Bab *keempat*, berisi analisis dari problem yang telah diambil oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan analisis genealogi kekuasaan dan arkeologi pengetahuan Michel Foucault.

Bab *kelima*, dalam bab ini penulis akan menjelaskan rangkuman tentang keseluruhan bab serta kesimpulannya. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran oleh peneliti.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Genealogi Kekuasaan Michel Foucault

##### 1. Arkeologi Pengetahuan Michel Foucault

Michel Foucault meragukan manusia memiliki pengetahuan tentang kebenaran mutlak atau hakiki maupun absolut. Menurut Michel Foucault, jika kebenaran mutlak tersebut disingkirkan maka pengetahuan hanyalah apa yang dikumpulkan dan diputuskan benar oleh sekelompok orang melalui konvensi sosial budaya atau lewat kesepakatan ilmiah. Untuk membangun sebuah kebenaran diperlukan tenaga sebagai kekuatan. Karena itu, Michel Foucault mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan yang bersifat memaksa.<sup>6</sup>

Michel Foucault adalah seorang pemikir dan kritikus pengetahuan serta seorang kritikus sosial. Oleh karena itu, latar belakang pemikiran Foucault dimulai dengan perenungannya mengenai kekuasaan-kekuasaan yang muncul akibat perilaku ekonomi dan pengetahuan masyarakat dunia dan seringkali kekuasaan-kekuasaan tersebut menimbulkan hal-hal negatif seperti kecurangan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Metode arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan Michel Foucault adalah dua inti pemikirannya, keduanya bersifat saling

---

<sup>6</sup> Iswandi Syahputra, "Pos Media Literacy; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault", *Jurnal ASPIKOM*, Vol.1, No.1 (Juli 2010), 4

<sup>7</sup> Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 1 (2012), 137

mendukung, berkaitan, dan berdampingan dilihat dari sisi substansi. Karena menurut Michel Foucault antara pengetahuan dan kekuasaan keduanya saling berkorelasi.

Sedangkan itu, untuk memahami metode arkeologi dan genealogi Michel Foucault maka kita memerlukan pemahaman tentang objek arkeologi dan genealogi yakni pengetahuan dan kekuasaan dalam wilayah pemikiran Michel Foucault. Kita harus terlebih dahulu memerlukan pemahaman terhadap pengetahuan yang seperti apa yang di arkeologikan oleh Michel Foucault dan kekuasaan yang seperti apa yang dibahas dalam metode genealoginya.

Arkeologi pengetahuan merupakan pencarian atas sistem umum, secara sederhana bisa diungkapkan bahwa arkeologi pengetahuan adalah metode penyusunan dan transformasi dokumen pernyataan ke dalam bentuk diskursif. Adapun tujuan dari arkeologi Michel Foucault adalah murni membahas tentang sejarah pemikiran. Michel Foucault membebaskan suatu pemikiran dari ikatan-ikatan apapun termasuk ikatan antropologis, sekaligus ingin mengetahui bagaimana ikatan-ikatan tersebut terbentuk. Tugas arkeologi dibatasi hanya untuk menganalisa formasi konsep tanpa harus mencampurkannya dengan horizon idealitas suatu pemikiran.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas*, (Yogyakarta: LEDALERO, 2013), 36

Michel Foucault mendefinisikan bahwa arkeologi sebagai bentuk eksplorasi sejumlah kondisi historis yang nyata dan spesifik dalam berbagai pernyataan dikombinasikan untuk membentuk dan mendefinisikan suatu pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Setiap objek historis yang berubah itu tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama sehingga diskursus senantiasa akan bersifat diskontinu.<sup>9</sup>

Adapun prinsip-prinsip yang penting dalam arkeologi menurut Michel Foucault yakni *pertama*, arkeologi tidak bersifat alegoris, artinya arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau muncul dalam diskursus-diskursus, akan tetapi arkeologi ingin menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri. *Kedua*, arkeologi bukanlah doksologi tapi analisis diferensial atas modalitas-modalitas diskursus. Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-transisi tak terindera di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain. Masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala kekhasannya. *Ketiga*, arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi, namun arkeologi juga tidak membahas suatu figur maupun pengarang sebuah karya dalam suatu kajian. *Keempat*, arkeologi adalah suatu bentuk deskripsi sistematis terhadap objek diskursus. Jadi arkeologi tidak

---

<sup>9</sup> Wahyu Iryana, *Historiografi Barat*, (Bandung: Humaniora, 2014), 61

berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dan dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskursus.<sup>10</sup>

## 2. Genealogi Kekuasaan Michel Foucault

Sedangkan Genealogi merupakan salah satu konsep pemikiran Foucault yang tidak kalah penting dengan arkeologinya. Pemikiran Genealogi Foucault merupakan pengaruh dari pemikiran Nietzsche. Michel Foucault mengembangkan dari genealogi humanis menuju sebuah genealogi kekuasaan dalam sudut pandang pemikirannya. Kaitannya dengan metode yang disebut sebelumnya tentang arkeologi, genealogi itu lebih bersifat strategis dalam mencapai tujuan dalam suatu analisis tertentu. Dalam pembahasan yang lebih jauh genealogi menelusuri kaitan antara kekuasaan dan pengetahuan atau kebenaran.<sup>11</sup>

Genealogi merupakan metode Michel Foucault yang gunanya dalam melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Jika dalam metode arkeologinya Michel Foucault mengorganisir tentang wacana, data, atau dokumen, secara ringkasnya arkeologi melakukan analisis secara empiris terhadap suatu diskursus<sup>12</sup>, maka tugas genealogi yakni melakukan

---

<sup>10</sup> Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 250-252

<sup>11</sup> Alfathri Adlin, "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia", *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol.1 No. 1 (2016), 18

<sup>12</sup> Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 1 (2012), 142



analisis secara kritis terhadap suatu diskursus dan merelasikan suatu dirkusus tersebut dengan isu-isu yang kontemporer.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Michel Foucault menggunakan metode genealoginya guna menjelaskan sejarah masa kini dengan menggunakan berbagai macam sumber sejarah dari metode arkeologinya untuk mencerminkan dan mengambil pengalaman dari kemungkinan-kemungkinan, singularitas, saling keterkaitan dan potensi-potensi beragam perlintasan unsur-unsur yang membentuk tatanan sosial terdahulu untuk masa kini.

Metode Genealogi merupakan langkah lanjutan dari metode arkeologi Michel Foucault, karena genealogi menelaah tentang perkembangan suatu *episteme*. Artinya jika arkeologi menyelidiki kelahiran pengetahuan manusia dalam konteks *episteme*, maka genealogi menunjukkan hubungan kekuasaan yang muncul dari hubungan itu terhadap *episteme*, sehingga Michel Foucault dapat membuktikan bahwa sejarah yang ada selama ini telah terdistorsi, intinya bukan lagi sejarah bahasa dan makna, karena Michel Foucault menemukan bahwa sejarah selama ini merupakan sejarah relasi kekuasaan.<sup>14</sup>

Genealogi merupakan metode pencarian yang digunakan oleh Michel Foucault untuk mengetahui asal-muasal subjek dalam suatu

---

<sup>13</sup> Ketut Wiradnyana, *Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 28

<sup>14</sup> *Ibid.*, 42

diskursus dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme kekuasaan yang dijalankan dalam suatu diskursus tersebut. Dengan kata lain mengkaji suatu diskursus adalah tugas melakukan genealogisasi subjek dengan melakukan penggalian dan analisa pada situasi tertentu tentang subjek seperti apakah yang akan terbentuk, bagaimana sejarah terbentuknya, dan apa mekanisme kekuasaan yang berlaku.<sup>15</sup>

Metode analisis genealogi Foucault dimulai dari melakukan penyelidikan terhadap karakteristik relasi kekuasaan, dalam hal ini genealogi bisa juga bertolak dengan mengajukan sebuah pertanyaan “bagaimana suatu kekuasaan bisa beroperasi?”. Pertanyaan semacam inilah yang menurut Michel Foucault bahwa kelebihan genealogi adalah sebagai sebuah metode analisis, yakni untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui sebuah pengetahuan.<sup>16</sup>

Genealogi beroperasi secara detail dalam kumpulan arsip-arsip dan penelitian yang terperinci. Terlebih dahulu bahwa metode genealogi dimulai dengan memasuki tumpukan dokumen, arsip kesejarahan, dan mengumpulkan berbagai sumber guna mempelajarinya secara teliti dan

---

<sup>15</sup> Umar Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik”, *Jurnal al-Khitabah*, Vol. 3, No. 1 (2017), 128

<sup>16</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (2013), 83

kemudian menjadikannya sebagai alat untuk membongkar asumsi-asumsi tradisional.<sup>17</sup>

Sebelum Michel Foucault berbicara secara eksplisit tentang isu kekuasaan, fokus perhatian pada karya-karya awalnya yakni pada sejarah pengetahuan. Adapun yang menjadi perhatiannya bukan penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin ilmu dari waktu ke waktu, akan tetapi sejarah pengetahuan sebagai sebuah *episteme*, yaitu suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu.

Penyelidikan sejarah inilah yang bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yaitu konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan, terorganisasi secara tematis, sehingga ia menjadi otoritatif dan legitimasi dalam menerangkan segala sesuatu. Struktur pengetahuan yang otoritatif dan legitimasi ini bisa mempengaruhi praktik-praktik sosial individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertindak sebagai sebuah rezim pengetahuan. Oleh karena itulah dalam karya awalnya yang berjudul *The Archeology of Knowledge*, struktur pengetahuan ini disebut sebagai suatu formasi wacana.<sup>18</sup>

Pengertian arkeologi pada karya tersebut tidak merujuk sebagai suatu metode penggalian sejarah antropologis yang mengandaikan bahwa

---

<sup>17</sup> Yogie Pranowo, "Genealogi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan", *Melintas: An International Journal of Philosophy and Religion*, Vol. 33, No. 3 (2016), 56

<sup>18</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (2013), 80

sejarah yang dalam hal ini adalah sejarah pengetahuan berkembang secara linear. Suatu bentuk pengetahuan dalam pandangan Michel Foucault dari masa ke masa bukanlah suatu perkembangan yang evolutif, akan tetapi sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana.

Metode arkeologi dapat digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Michel Foucault sebagai *episteme*. *Episteme* adalah suatu bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu dalam suatu zaman tertentu dan dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman. Dalam studinya tentang kegilaan, misalnya Michel Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaannya terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan.

Pemantapan pengetahuan sehingga menjadi khas, dan melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan yang tidak lepas dari bagaimana pengetahuan yang ilmiah berelasi dengan pengetahuan awam. Pemantapan inilah berlangsung pada level wacana (diskursus). Untuk itu sebagai sebuah *episteme*, dalam hubungannya dengan pengetahuan ilmiah tidak lagi berdiri sebagai suatu cara pandang dalam melihat perbedaan dan pemisahan antara yang benar dari yang salah, melainkan pemisahan dalam ranah praktis antara yang mungkin dari yang tidak mungkin dilakukan atau dipikirkan dengan pendasaran pengetahuan yang ilmiah.

Oleh karena itu melalui *episteme*, maka strategi beroperasinya kekuasaan dalam pengetahuan dapat mudah diketahui. Michel Foucault menggunakan arkeologinya untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan *episteme*, yaitu mengetahui bagaimana terjadinya perubahan rezim pengetahuan dari suatu masa. Sehingga terjadinya perubahan itulah yang melibatkan beroperasinya kekuasaan.<sup>19</sup>

Secara implisit, sebenarnya Michel Foucault ingin menyampaikan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat terbentuk sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang dapat mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, serta wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi dalam sebuah pengetahuan. Oleh karena itu dalam pandangan Michel Foucault yang terinspirasi oleh Nietzsche, yakni tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan benar yang final dan bersifat universal. Kebenaran tidak lain yakni kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang ada pada suatu masa tertentu dan diakui otoritatif serta hanyalah legitimasi belaka.

Padahal suatu kebenaran sebagaimana yang dipahami oleh Michel Foucault adalah produk beragam rezim diskursif yang ada dalam suatu masyarakat. Menurut Michel Foucault kebenaran merupakan produk relasi pengetahuan dan kuasa melalui medium wacana yang hadir di dunia manusia. Oleh karena itu Michel Foucault tidak percaya terhadap

---

<sup>19</sup> Ibid., 82

pemikiran bahwa ekonomi sebagai satu-satunya dasar sejarah sebagaimana yang dikatakan oleh Marx. Akan tetapi wacana yang merupakan bentuk sumber dari sejarah.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, Michel Foucault berkeinginan menggeser poros perhatian filsafat, yakni aktivitas filsafati tak lagi mencari hakikat kebenaran, atau pun mencari relasi kebenaran dengan benda dan sesuatu, melainkan mengungkap bagaimana wacana (misalnya kegilaan, seks, tubuh, pendidikan, dan seterusnya) dibentuk dan tampil sebagai kebenaran. Dengan kata lain, berfilsafat adalah menguraikan sejarah ide bukan untuk menegaskan akan kebenarannya, tetapi bertujuan menyingkap asal usul dan silsilah beragam *episteme*, yakni kumpulan kaidah yang melandasi dan mengatur produksi wacana pada suatu masa tertentu, melalui penelusuran berbagai kondisi produksi wacana.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas tentang metode yang digunakan Michel Foucault yang disebutnya arkeologi dan genealogi. Maka Arkeologi bertujuan menyingkap berbagai sistem dan model pemikiran dalam sejarah, serta menelaah asal-usul dan silsilah perkembangannya yang disebut Michel Foucault sebagai genealogi. Intinya bagi Michel Foucault bahwa sejarah adalah sebuah suksesi dari tatanan-tatanan pengetahuan dan

---

<sup>20</sup> Lydia Alix Fillingham, *Foucault*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 100

<sup>21</sup> Muhammad Hamid Anwar, "Nalar Kuasa di Balik Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif Arkeologi dan Genealogi Michel Foucault", lihat dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-muhammad-hamid-anwar-m-phil/penjas-dalam-perspektif-foucault.pdf>. Diakses pada 19 Juli 2021

kekuasaan berbeda yang secara radikal mendefinisikan apa yang dianggap benar.

Arkeologi merupakan sebuah cara atau alat dalam melakukan analisis historis terhadap sistem pemikiran atau wacana. Pengertian wacana sendiri mulanya dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menunjuk pada bahan bacaan, percakapan, dan tuturan. Kata wacana merupakan sinonim dari istilah *discourse* dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu para ahli bahasa menyepakati bahwa istilah wacana merupakan satuan bahasa yang paling besar digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa dibawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frasa, kata, dan bunyi. Secara berurutan, rangkaian bunyi membentuk kata. Rangkaian kata menciptakan frasa, dan gabungan frasa membentuk kalimat. Akhirnya, rangkaian kalimat membentuk wacana. Semuanya itu bisa berwujud lisan maupun tulisan.<sup>22</sup>

Adapun *discourse* di sini dipadankan dengan istilah wacana dalam bahasa Indonesia karena lebih mendekati apa yang dimaksud oleh Michel Foucault. Wacana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yakni *pertama*, komunikasi verbal; percakapan. *Kedua*, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. *Ketiga*, satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan di bentuk karangan atau laporan utuh seperti novel, buku, artikel, pidato, atau khotbah. *Keempat* kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis; kemampuan atau proses

---

<sup>22</sup> Dendi Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 1552



memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat. *Kelima*, pertukaran ide secara verbal.<sup>23</sup>

Adapun sumber daripada kebenaran dan pengetahuan adalah sebuah bahasa, wacana, dan *episteme* yang dipraktikkan dan diproduksi oleh beragam aparatus dan rezim dalam masyarakat. Jadi, segala hal atau peristiwa apapun dalam sejarah kemanusiaan itu tidak ada yang luput dari pengaruh relasi pengetahuan dan kuasa.<sup>24</sup>

Sejarah juga sering diartikan sebagai wacana atau dalam sebutan lain yakni *history as discourse*. Pengertian ini didasarkan pada problem atau masalah dalam penulisan sejarah atau yang dikenal juga dengan historiografi. Pada konteks inilah sejarah ditempatkan sebagai sebuah wacana yang diperdebatkan oleh sejarawan. Pada titik inilah para sejarawan berdebat tentang hakikat sejarah; “apakah sejarah itu identik dengan narasi atau cerita? Apabila keduanya berbeda, apa perbedaan sejarah dan cerita?” Misalnya, G.J. Renier berpandangan bahwa “*history is the story of the experiences of men living in societies*” yang artinya sejarah merupakan cerita pengalaman hidup manusia di masyarakat. Tetapi

---

<sup>23</sup> Ibid., 1552

<sup>24</sup> Muhammad Hamid Anwar, “*Nalar Pendidikan di Balik Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif Arkeologi dan Genealogi Foucault*”, lihat dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-muhammad-hamid-anwar-m-phil/penjas-dalam-perspektif-foucault.pdf>. Diakses pada 22 Juli 2021



pandangan ini ditolak oleh Stanford. Stanford mengatakan bahwa sejarah berbeda dengan cerita maupun narasi.<sup>25</sup>

Perbedaan di atas tersebut meliputi seluruh aspek, yakni permulaan, pokok masalah, peristiwa, ciri-ciri atau karakter, keadaan atau letak, rangkaian, isi cerita, sudut pandang, kehadiran kebenaran, waktu internal, akhir, dan kebenaran. Adapun tentang kebenaran yang menjadi ciri terakhir tersebut adalah perbedaan mendasar, karena sejarah mengandaikan berisi kebenaran, sedangkan fiksi tidak selalu mengandung kebenaran. Kendati demikian mengajarkan sejarah seperti mendongeng atau *story-telling* atau dengan kata lain, sejarah disampaikan melalui pernyataan lisan. Bahkan dalam akhir-akhir ini sejarah sering disampaikan melalui media televisi, drama, film dan sarana gambar lainnya.<sup>26</sup>

Sebenarnya arkeologi merupakan sebuah upaya Foucault menggeser kajian sejarah dari tema-tema kesatuan dan totalitas menuju diskontinuitas yang selama ini sengaja diabaikan oleh sebagian besar para sejarawan. Kontinuitas diartikan oleh Michel Foucault sebagai ambang batas, selaan, retakan, mutasi dan transformasi yang bisa dilihat pada lapisan sejarah yang lebih dalam dengan ritme-ritmenya yang semakin beragam.<sup>27</sup> Untuk itu kajian tentang arkeologi menjadi sangat penting bagi Michel Foucault, karena sejarah dalam arti tradisional dipahami sebagai

---

<sup>25</sup> Abdul Rani, dkk., *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 13-15

<sup>26</sup> Ibid., 13-15

<sup>27</sup> Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Jogjakarta: IRCiSod, 2012), 57

proses mengingat hal-hal monumental di masa lalu yang telah merubah dirinya menjadi sebuah bentuk dokumen.

Pada perantara dokumen inilah, sejarah berusaha mengumpulkan jejak yang ditinggalkan oleh manusia. Para sejarawan mengumpulkan dan memilah dokumen-dokumen sehingga menjadi sebuah totalitas yang saling terhubung atau berkorelasi. Menurut Michel Foucault sudah waktunya arkeologi digunakan sebagai disiplin ilmu yang bersentuhan dengan beragam monumen bisu, jejak-jejak benda, benda-benda tanpa konteks, dan segala hal yang tercecer di masa lalu, setelah itu dimasukkan ke dalam kajian sejarah untuk memberikan makna pada sejarah dengan cara restitusi wacana-wacana sejarah.

Akan tetapi tujuan arkeologi ini dalam praktiknya seringkali mengalami salah terapan dan terlanjur dikenal sebagai sejarah ide-ide. Untuk itu, dalam menjelaskan arkeologi, Michel Foucault menyebutkan sejarah ide sebagai batas-batas definitif arkeologi pengetahuan. Intinya, Michel Foucault mencoba membatasi wilayah arkeologi pengetahuan dengan menolak konsep-konsep dari sejarah ide sebagaimana yang sering disalah pahami.

Sejarah ide adalah pembahasan tentang permulaan dan kesudahan, deskripsi tentang keberlanjutan, dan kehadiran suatu diskursus. Definisi ini berbeda dengan arkeologi yang digagas oleh Michel Foucault, karena menurutnya arkeologi berfokus kepada diskursus itu sendiri, bagaimana

menentukan dan mendefinisikan diskursus tersebut dalam membentuk aturan-aturan yang diterapkan dalam prakteknya.<sup>28</sup>

Adapun karakter spesial arkeologi pengetahuan Michel Foucault dari segi objektifikasinya yakni *pertama*, membatasi diskursus dalam sisi keberadaannya sebagai suatu praktek yang dikontrol oleh metode tertentu dengan cara penetrasi di dalam ketidakjelasan suatu diskursus sampai menemukan esensinya. Kedua, membatasi spesialisasi diskursus dengan cara menunjukkan bagaimana suatu metode mendominasi suatu diskursus dan mengobservasi fenomena dan gambaran eksternal diskursus agar bisa mengetahuinya secara komprehensif dan bisa membedakan antara formulasi dan ekspresi diskursus. *Ketiga*, membatasi tipologi dan metodologi praktis suatu diskursus yang mendominasi agar bisa mengontrolnya. *Keempat*, Arkeologi pengetahuan merupakan tulisan kedua, dan tidak merubah tulisan pertama secara sistematis, dan tidak menyalahi bentuk eksternalnya. *Kelima*, arkeologi pengetahuan merupakan sebuah representasi sistematis diskursus dan dijadikan sebagai obyek.<sup>29</sup>

Dari pemaparan di atas dapat di indikasikan bahwa jeratan metodologi atas diskursus harus diuraikan dan diidentifikasi model belenggunya mengingat suatu diskursus merupakan obyek dari arkeologi. Maka dari itu tampilannya harus tetap diperhatikan dan jika bisa

---

<sup>28</sup> Ibid., 248

<sup>29</sup> Irfan Sanusi, "Membedah Diskursus Dan Berkreasi Dalam Ranah Pluralitas: Rereading Arkeologi Pengetahuan", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 15, (januari – Juni, 2010), 998

dibandingkan dengan diskursus lain terdapat usaha untuk bisa menyaksikan sebuah fenomena secara langsung agar bisa masuk kedalam esensinya dan bisa menghantarkan kepada kreasi baru melalui jalan yang lain.

Sedangkan metode genealogi kekuasaan Michel Foucault memiliki tiga pengertian yakni *ursprung*, *herkunft*, dan *eststechung*. Metode *Ursprung* adalah upaya untuk mencari asal-usul dengan cara menguji asal-muasal dari kemunculan suatu peristiwa. Metode *Herkunft* adalah upaya untuk mencari asal-usul dengan cara mengidentifikasi terjadi suatu penyimpangan waktu, musibah, kekeliruan, dan lainnya yang dibiarkan untuk muncul pada semua hal terutama yang eksis dan bernilai bagi manusia. Sedangkan metode *eststechung* adalah upaya untuk mencari asal-usul dengan cara, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Maksudnya metode *eststechung* mengajarkan untuk menyusun kembali sistem yang beranekaragam tentang sebuah subjek dan dominasi yang terdapat dalam peristiwa tersebut.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Khilafah**

### **1. Pengertian khilafah**

Khilafah secara bahasa berasal dari kata *khalafa* yang artinya mengganti, menempati tempatnya, atau yang berarti orang yang akan menggantikan datang setelah orang yang digantikan lalu dia menempati

---

<sup>30</sup> Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 29

kedudukan tersebut. Secara istilah khilafah disebut orang yang mengganti, yang memiliki arti wakil, pengganti, dan pemimpin.<sup>31</sup> Dalam hal ini khilafah adalah menggantikan tugas Rasulullah saw untuk menerapkan undang-undang sesuai syari'ah dan menjalankan ajaran agama pada satu tujuan yang wajib diikuti oleh umat Islam.

Adapun secara makna istilah khilafah hampir sama dengan *imamah* dan *imarotul mu'minin*. Pada perkembangan zaman, khilafah dapat diartikan sebagai negara Islam atau sistem pemerintahan Islam, hal ini mengacu dalam kalimat *al islam dinn wa minhu ad daulah* yang artinya Islam adalah agama yang sebagian ajarannya tentang negara.<sup>32</sup>

## **2. Sejarah khilafah**

Konsep kekhilafahan itu dimulai sejak pemerintahan *khulafa' al-rasyidun* Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menggantikan posisi atau kedudukan sebagai pemimpin negara setelah Nabi Muhammad saw wafat. Pemilihan menggantikan Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara merupakan sebuah permasalahan yang sangat rumit karena posisi pengganti beliau bukan hanya sekedar menjadi kepala negara saja, akan tetapi juga sebagai seseorang yang dapat mencerminkan dan perilaku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu sahabat-sahabat saat itu sibuk dalam pencarian pengganti Nabi Muhammad saw sehingga membuat pemakaman

---

<sup>31</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Malang: Indonesiatara, 2001), 30

<sup>32</sup> Baidhowi, "Khilafah Dalam Konteks Negara Pancasila", *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2016), 498

Nabi Muhammad saw menjadi permasalahan yang kedua bagi para sahabat.<sup>33</sup>

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, praktek akan kekhilafahan terdapat pada enam abad pertama Islam yang dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu:

- a. Khulafa' Ar-Rasyidun (632-661 M / 11-40 H)
  - 1) Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M/11-13 H)
  - 2) Umar bin Khattab (634-644 M/13-23 H)
  - 3) Ustman bin 'Affan (664-656 M/23-35 H)
  - 4) Ali bin Abi Thalib (656-661 M/35-40 H)
- b. Kekhalifahan Bani Umayyah (661-750 M)
- c. Kekhalifahan Bani Abbasyiah (750-1258 M) dan Kekhalifahan Ustmaniyah Turki di Istanbul (1299-1924 M)

Pasca berakhirnya jabatan oleh Khulafa ar-Rasyidun, pemerintahan negara dilanjutkan oleh Dinasti Bani Umayyah (Periode ke-2) lalu dilanjutkan hingga periode ke-3. Dari pemerintahan masa Khalifah awal Bani Umayyah hingga masa Khalifah terakhir Dinasti Ustmaniyah masih memiliki tujuan yang sama yakni memajukan peradaban serta melanjutkan tanggung jawabnya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Akan tetapi, metode yang digunakan oleh setiap Khalifah dalam memimpin tentunya berbeda. Yang menjadi sorotan peneliti disini adalah adanya pemberontakan di setiap kepemimpinan

---

<sup>33</sup> Ihda Roudhotul Ihsaniah, "Konsep Khilafah dan Nation State Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia" (Skripsi— UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 20

Khalifah. Bahkan dalam sejarah mengisahkan bahwa dahulu pada masa transisi dari kekhalifahan Bani Umayyah ke Bani Abbasyiah terjadi pemberontakan berupa pembunuhan secara besar-besaran. Peristiwa tersebut terjadi karena Bani Abbasyiah melakukannya atas dasar politik balas dendam kepada kaum Bani Umayyah.<sup>34</sup>

### C. Tinjauan Tentang Film

Belakangan ini banyak film bertema sejarah yang diproduksi pasca Orde Baru telah menyediakan publik cara baru dalam mengakses tentang sejarah. Informasi tentang fakta sejarah melalui film menjadi hal yang masif dan mewarnai belantika perfilman Indonesia. Jika dihitung sejak pergantian rezim politik tahun 1998, terdapat film yang berjudul *Gie* (2005) yang merupakan awal muncul film sejarah di Indonesia, hingga masa kini sudah terdapat belasan judul film yang menjadikan informasi tentang sejarah sebagai plot atau narasi utama dan ditayangkan di layar lebar.

Antara lain film bertema sejarah yakni Merah Putih (2009), Merah Putih 2: Darah Garuda (2010), Sang Pencerah (2010), Hati Merdeka (2011), Sang Penari (2011), Soegija (2012), Habibie dan Ainun (2012), Sang Kiai (2013), Soekarno (2013), Tjokroaminoto (2015), Kartini (2016), dan Wage (2017), dan lain sebagainya yang juga ditayangkan di media Youtube. Produksi Film sejarah umumnya mendapat dukungan dari

---

<sup>34</sup> Nadirsyah, *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*, Jilid I, Cet. 3 (SUKA PRESS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2018), 169



lembaga pemerintahan bahkan keluarga para tokoh yang di kisahkan hidupnya dan di angkat ke sebuah film untuk ditayangkan.<sup>35</sup>

Dalam dunia akademisi, film sejarah merupakan sebuah fenomena zaman yang baru dimana teknologi informasi berbasis digital dan audiovisual berkembang sangat pesat. Perkembangan film tentang sejarah berada di luar kendali sejarawan yang tidak bisa mengikuti laju perkembangan teknologi informasi khususnya pada fenomena masyarakat pos-literasi. Masyarakat pos-literasi adalah konsep yang merujuk pada keadaan suatu masyarakat memperoleh ataupun mencari sumber informasi dan pengetahuan melalui media digital sehingga baca tulis tidak lagi diperlukan.

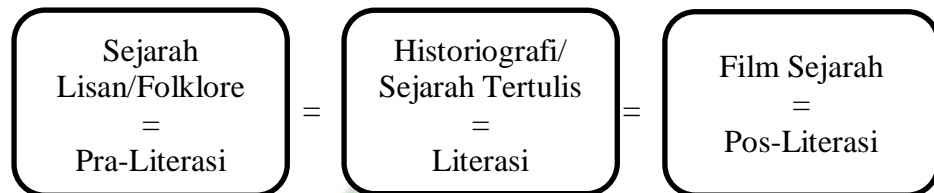
Fenomena di atas di zaman sekarang yang menjadikan perubahan besar terhadap posisi literasi yakni dalam artian sumber pengetahuan tertulis ke arah sumber pengetahuan yang berbasis multimedia atau audiovisual. Kondisi demikian juga tentu menggoyahkan posisi historiografi yang sebagai bentuk penyajian tertulis dalam disiplin ilmu sejarah. Karena dalam masyarakat pos-literasi, film sejarah adalah sumber pengetahuan tentang masa lalu yang dianggap tepat dan sumber sejarah

---

<sup>35</sup> Krishna Sen, *Kuasa Dalam Sinema: Negara, Masyarakat, dan Sinema Orde Baru*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), 4



yang tertulis dianggap hanya berlaku pada masyarakat literasi berkembang.<sup>36</sup>



Pada zaman pos-literasi masa kini di mana film sejarah dapat dijadikan sumber dan bentuk penyajian baru selain historiografi, maka film sejarah tidak perlu dibandingkan dengan historiografi karena terdapat mempunyai keunggulan masing-masing. Film sejarah mempunyai keunggulan dalam mempresentasikan dan menghadirkan citra tentang masa lalu sehingga penonton lebih mudah membayangkan masa lalu melalui perangkat audio dan visualisasi yang bergerak yakni sebuah film sejarah. Sedangkan historiografi mempunyai keunggulan dalam memberikan penjelasan atau eksplanasi tentang proses dan kausalitas sebuah peristiwa.

Meskipun film sejarah banyak diminati oleh masyarakat sekarang, hal lain yang lebih penting ketika memahami sejarah dalam film sejarah adalah perlu menganalisisnya sebagai representasi visual dan segi dramatis yang melibatkan hubungan masa lalu, sekarang, masa depan, kejadian, tokoh, kepercayaan, dan ideologi yang melingkupinya. Sumber referensi

---

<sup>36</sup> Luqman Abdul Hakim, "Menerawang Masa Lalu Di Era Digital: Film Sejarah Vis A Vis Historiografi", *Sasdaya: Gajah Mada Journal Of Humanities*, Vol. 3, No. 1, (Februari, 2019), 38

sejarah dalam film sejarah juga harus diperhatikan dengan jelas dan valid, narasi sejarah harus resmi dan diproduksi oleh negara, serta dalam film sejarah harus melibatkan sejarawan yang ahli dalam bidang itu. Karena banyak film sejarah yang tidak mampu menghadirkan narasi sejarah alternatif dan tidak menghadirkan sejarawan yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut.

### **1. Pengertian Film**

Film merupakan sebuah media komunikasi yang bersifat audio visual guna menyampaikan suatu pesan kepada kelompok masyarakat yang berkumpul di suatu tempat tertentu sehingga film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya dikarenakan sifatnya yang audio visual. Film mampu bercerita yang banyak dalam waktu yang singkat.<sup>37</sup> Dapat dikatakan film bertujuan untuk menyampaikan pesan sosial atau moral tertentu kepada penontonnya. Secara etimologi film adalah *cinematographie*, gabungan dari kata *cinema* dan *tho* atau *phytos*. *Cinema* yang berarti “gerak” sedangkan *tho* atau *phytos* berarti cahaya. Dari pengertian secara etimologi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa film adalah kegiatan melukis sebuah gerak dengan memanfaatkan suatu cahaya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rahman Asri, “Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 1, No.2, (Agustus 2020), 74

<sup>38</sup> Muhammad Ali Mursid Alfathoni dan Dani Manesah, “*Pengantar Teori Film*” (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2

Film memiliki arti atau nilai seni sendiri karena film tercipta sebagai sebuah karya dari tenaga-tenaga kreatif yang berpengalaman atau profesional di bidangnya. Film bukanlah hal yang baru bagi masyarakat. Karena film bagian dari kehidupan masyarakat dan film tersedia dalam berbagai wujud seperti di Bioskop, tayang dalam televisi, dalam bentuk kaset video, dan lainnya. Film bukan hanya menampilkan pengalaman yang menghibur, akan tetapi juga menampilkan pengalaman hidup sehari-hari yang di olah dan di kemas secara menarik.<sup>39</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, film didefinisikan sebagai selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di Bioskop). Film juga dapat diartikan sebagai lakon, maksudnya film itu mempresentasikan sebuah cerita atau peristiwa dari salah satu tokoh tertentu secara utuh dan terstruktur. Film juga disebut sebut sebagai sebuah seni peran yang divisualkan.<sup>40</sup> Menurut Prof. Dr. Azhar Arsyad film adalah kumpulan beberapa gambar dalam sebuah bingkai yang kemudian diproyeksikan melalui lensa proyektor, sehingga ketika sudah berada di layar gambar-gambar tersebut akan tampak hidup.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Yoyon mudjiono, "Kajian Semiotika dalam Film", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.1, (April 2011), 126

<sup>40</sup> Anton Maburi, *Manajemen Produksi Program Acara Televisi Format Acara Drama* (Jakarta: PT. Grasindo, 2013), 2.

<sup>41</sup> Bekti Marga Ningsih dan Chr. Argo Widiharto, "Peningkatan Disiplin Siswa dengan Layanan Informasi Media Film", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No. 1 (Oktober, 2014), 83.

Secara tidak langsung, ketika menonton sebuah film, para penonton akan merasa seakan-akan ia berada dalam cerita. Emosi yang disuguhkan dalam sebuah film pun akan terasa nyata bagi para penontonnya. Dalam setiap film, tentunya memiliki beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis naskah kepada para penonton. Hal inilah, yang kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pembentukan karakter penonton.<sup>42</sup> Bahkan sebuah film disebut sebagai alat yang paling ampuh untuk menyebarkan ide atau pendapat tertentu.<sup>43</sup> Film dianggap sebagai bentuk seni yang cukup penting, juga sumber hiburan, dan media yang ampuh untuk mendidik atau mengindoktrinasi masyarakat.

Film merupakan sebuah wadah yang berguna untuk menyajikan hiburan yang di dalamnya mengandung cerita, musik, drama, lawak, dan masih banyak lagi. Film merupakan perpaduan seimbang antara seni musik, seni sastra, seni peran, dan komedi. Semua hal itu, dikemas dengan sangat baik dalam bentuk film.<sup>44</sup> Film mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat. Lewat kreativitas para pencipta film, juga menjadikan film mempunyai nilai seni tersendiri.

Dari ulasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa film merupakan sebuah karya seni yang berupa cerita dalam bentuk gambar dan suara atau audiovisual yang di buat berdasarkan kaidah sinematografi yang

---

<sup>42</sup> Sri Wahyuningsih, *Film dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-pesan Dakwah dalam Film Melalui Analisis Semiotik*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 9

<sup>43</sup> Ekky Al Malaky, *Remaja Doyan Nonton: Seri Penuntun Remaja*, (Bandung: DAR Mizan, 2004), 116

<sup>44</sup> Yuyon Mudjiono, "Kajian Semiotika dalam Film", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 1 (April, 2011), 125

di kemas sedemikian rupa dengan menggunakan permainan kamera, teknik editing, dan skenario yang ada.

## 2. Pengertian Film Dokumenter

Secara umum sebuah film di bagi menjadi tiga jenis, yaitu film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, film dokumenter merupakan sebuah dokumentasi dalam bentuk film mengenai suatu peristiwa bersejarah atau suatu aspek seni budaya yang mempunyai makna khusus agar dapat sebagai alat penerang dan alat pendidikan.<sup>45</sup> Film dokumenter atau film nonfiksi merupakan sebuah rekaman gambar seremonial organisasi (kegiatan formal) ataupun budaya adat tradisional (*life style*) yang telah direkam guna kepentingan pribadi atau dipublikasikan. Jadi Film dokumentasi sering diproduksi pada saat waktu atau kegiatan penting dalam suatu instansi pemerintah atau swasta serta rekaman pernikahan ataupun upacara adat tradisional.

Dalam film dokumenter terdapat beberapa jenis film dokumenter yakni dokumenter laporan perjalanan, dokumenter sejarah, dokumenter potret atau biografi, dokumenter perbandingan atau kontradiksi, dokumenter ilmu pengetahuan, dokumenter rekonstruksi, dokumenter nostalgia, dokumenter investigasi, dokumenter eksperimen atau seni, dokumenter buku harian dan dokumenter drama.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 242

<sup>46</sup> Andi Fachrudin, *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*, (Jakarta: kencana, 2012), 322-333

Film dokumenter awal mulanya berangkat dari satu gagasan. Oleh karena itu, dunia gagasan menjadi sumber lahirnya beragam bentuk atau jenis film dokumenter. Ketika menikmati atau menonton film dokumenter, maka yang ditonton yakni dunia gagasan. Sebagai pembuat film dokumenter selalu berusaha untuk mencoba mengomunikasikan ide-idenya melalui perpaduan antara gambar dan suara serta karakter. Pembuat film dokumenter juga bertujuan memberikan sebuah keyakinan kepada penontonnya tentang apa yang dia rekam.

Gagasan atau ide sebuah film sebenarnya adalah bisa berasal dari mana pun tanpa adanya batasan ruang dan waktu, artinya bisa berasal dari cerita orang lain. Sebuah gagasan film juga bisa berasal dari bacaan buku, majalah, koran, televisi, radio, hasil penelitian dan yang lain. Sumber gagasan inilah yang menjadi amunisi oleh pembuat film. Dari keragaman ide atau gagasan inilah akhirnya pembuat film akan mencoba menjadikannya lalu membentuknya menjadi sebuah film. Ide atau gagasan yang baik dan menarik harus di latarbelakangi oleh adanya kepentingan si pembuat film.

Pesan di sini bukan sekedar ide yang dipunyai pembuat film dokumenter. Jadi penonton setidaknya akan tertarik untuk bisa melihat sebuah cara pandang dari pembuat film dokumenter. Ketika pembuat film melihat sebuah peristiwa, kondisi, yang ada lingkungan, kemudian pembuat film merepresentasikannya kembali dalam bentuk film. Film dokumenter mempunyai kesan yang nyata dan penuh dengan fakta. Film

dokumenter merupakan sesuatu gambaran visual dan bersuara yang berupaya untuk bisa meyakinkan penontonnya. Usaha untuk memberikan keyakinan atau menguatkan tingkat kepercayaan merupakan aspek yang terkandung dalam film dokumenter.

Dalam film dokumenter sebuah riset menjadi faktor yang sangat penting. Riset adalah usaha mengumpulkan sebuah fakta dan data tentang apa yang diharapkan dalam film nantinya. Riset film dokumenter tidak hanya dilakukan pada fase pra-produksi saja, akan tetapi pada saat *shooting* atau merekam dilapangan riset akan terus berlangsung. Oleh karena itu film akan menjadi menarik, manakala ada konflik.<sup>47</sup>

Dalam film dokumenter posisi riset menjadi satu hal yang penting karena upaya untuk bisa mengumpulkan bahan baku dalam cerita film merupakan tuntutan dasarnya. Jadi tidak bisa seenaknya hati membuat dan menciptakan adegan yang memang tidak bermula dari nilai faktualnya tersebut. Inilah yang menjadi beban dari film dokumenter, yaitu tidak bisa mendesain sebuah konflik layaknya sebuah film cerita. Oleh karenanya pada tahapan riset terdapat dua hal yang bisa dilakukan, yaitu melakukan riset pustaka dan riset visual atau riset lapangan.

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa setiap film pasti mempunyai maksud, isi, informasi, dan pesan yang baik, begitu juga dengan film dokumeter Jejak Khilafah di Nusantara, isi yang ingin

---

<sup>47</sup> Maulidar, "Film Dokumenter Sebagai Media Dakwah Studi Pada Film Dodaidi", (Skripsi—Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar – Raniry Banda Aceh, 2018), 16



disampaikan yaitu tentang Khilafah Islamiyah, terutama pada masa Khalifah Utsman yang dahulu pernah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nusantara.

Dari beberapa film yang sudah ada, film yang menceritakan mengenai sejarah merupakan film yang harus diperhatikan dalam menceritakannya, artinya kita tidak bisa asal-asalan dalam membuat alur ceritanya, sumber-sumber dan narasumber yang dijadikan rujukan cerita haruslah benar-benar paham dan menguasai sejarah yang diceritakannya, apalagi yang berkaitan dengan Agama. Khilafah merupakan salah satu pokok pembahasan yang telah lama menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya pada kalangan masyarakat Islam.

Akan tetapi soal isi film tersebut yang diluncurkan diklaim sebagai film sejarah yang dianggap mendekati sebuah khayalan untuk kepentingan propaganda ketimbang dokumenter. Hal ini diketahui dengan materi riset dari film dokumenter tersebut sama sekali tidak didukung dengan data atau arsip kesejarahan yang valid. Oleh karena itu film ini menimbulkan pro dan kontra dalam penayangan di media sosial



### BAB III

## GAMBARAN UMUM TENTANG FILM JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA

### A. Profil Film Jejak Khilafah di Nusantara



Gambar 3.1: Cover Film Jejak Khilafah di Nusantara

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=WQW0D3vLR4g>

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai narasi dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara yang narasi sejarahnya mengandung kontroversi dari masyarakat terutama ahli sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kritikan dan kontra dari beberapa ahli sejarah termasuk kritik dari sejarawan Peter Carey terhadap isi dari film dokumenter tersebut.

Film Dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara di unggah pertama kali di akun channel youtube Khilafah channel pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriyah. Film Jejak Khilafah di Nusantara di sutradarai

dan di inisiasi oleh sejarawan bernama Nicko Pandawa dan Komunitas Literasi Islam.<sup>48</sup>

Film ini diangkat dari data-data otentik yang terdapat dalam skripsi milik sejarawan Nicko Pandawa. Akan tetapi setelah dirilis, film dokumenter tersebut menuai beragam kritik oleh masyarakat, lantaran film tersebut juga mencantumkan nama dan argumen sejarawan terkenal yaitu Peter Carey guna memperkuat bukti bahwa pernah ada sistem Khilafah di Nusantara.

Film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara ini sempat trending topik di twitter Indonesia. Netizen pun yang meramaikan Twitter dengan membuat tagar film tersebut mengajak warganet untuk turut menonton film tersebut, sehingga sebagian dari mereka membagikan sebuah cupilkan video dokumenter tersebut. Akan tetapi film dokumenter yang di tayangkan secara *live* atau langsung itu mendadak tidak bisa di putar dengan alasan munculnya sebuah tulisan di layar "*Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah*".

Sebelum Film Jejak Khilafah di Nusantara tayang, warganet disuguhkan dahulu dengan talk show secara streaming bersama para tokoh pembicara, antara lain yakni Ismail Yusanto (penasihat Komunitas Literasi Islam), Nicko T. Pandawa (produser sekaligus penulis naskah Jejak

---

<sup>48</sup> Film Jejak Khilafah Diviralkan, Isinya Pun Disebut Khayalan, lihat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5151703/film-jejak-khilafah-diviralkan-isinya-pun-disebut-khayalan>. Diakses pada 4 Agustus 2021

Khilafah di Nusantara), dan Septian A. W. (sejarawan muda), dan tokoh yang lainnya, termasuk Peter Carey. Dalam *talkshow* tersebut, Septian menyebut salah satu latar belakang film ini diproduksi adalah untuk menjawab tantangan zaman karena Khilafah telah menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

Septian beserta tim lainnya merasa terketuk untuk bisa menghadirkan riwayat atau kisah tentang khilafah di Nusantara ke tengah masyarakat Indonesia lewat film dokumenter ini. “Kita ingin menampilkan kisah tersebut dalam format yang lebih menarik, yakni berupa audio-visual, film dokumenter,” ujarnya.

Sementara itu, Ismail Yusanto juga mengatakan “Jika sejarah itu benar, maka *ibrah* atau pelajaran yang akan didapat adalah benar. Namun jika sejarah itu ditulis salah, maka *ibrah* yang akan didapatkan adalah salah,” demikian tutur Ismail Yusanto dalam *talkshow* peluncuran film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara pada hari Kamis, 20 Agustus 2020, di saluran streaming Khilafah Channel. Ismail Yusanto menjelaskan perihal sejarah dalam pandangan Islam. Ia menjelaskan bahwa sejarah adalah objek pemikiran, maka sejarah menjadi pelengkap atau pendukung dari sebuah ajaran.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> “Digging Up the Truth” melalui Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.muslimahnews.com/2020/08/20/digging-up-the-truth-melalui-film-jejak-khilafah-di-nusantara/>. Diakses pada 13 Agustus 2021

“Dalam hal ini Khilafah, yakni sebuah ajaran Islam yang kemudian melihat bagaimana sejarah Khilafah, khususnya di Nusantara,” jelas penasihat Komunitas Literasi Islam. Komunitas Literasi Islam sendiri adalah pihak yang bekerja sama dengan Khilafah Channel dalam produksi ini. Sehingga ada atau tidak adanya hubungan dalam sejarah tersebut, misalnya, tetap tidak bisa menunjukkan bahwa Khilafah itu tidak ada, karena Khilafah itu adalah ajaran Islam. “Orang mengatakan sejarah itu *“second hand reality”*, yakni bergantung siapa yang menuturkan. Itu tidak terlepas dari latar belakang politik, pengaburan dan penguburan sejarah,” ujarnya. Maka, ada pesan penting yang disampaikan Ismail Yusanto, bahwa sejarah digunakan untuk menggali kebenaran.

Setiap film pasti mempunyai maksud, isi, informasi, dan pesan yang baik, begitu juga dengan film dokumeter Jejak Khilafah di Nusantara, isi yang ingin disampaikan yaitu tentang Khilafah Islamiyah, terutama pada masa Khalifah Utsman yang dahulu pernah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nusantara.

Film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara menceritakan hubungan Indonesia dengan istilah nama nusantara memiliki kaitan yang erat dengan khilafah Islamiyah pada masa Khalifah Utsman yang dibubuhi dengan nuansa gambar yang membuatnya semakin terkesan *base true story* dari beberapa dokumen yang menjadikan Islam tegak di Indonesia. Oleh karena itu, film ini dianggap sangat menarik untuk mengungkap

sejarah religi yang berkaitan dengan Indonesia sehingga menuai perhatian banyak orang untuk menontonnya.

Film Jejak Khilafah di Nusantara dibuka dengan teks yang mengklaim diri sebagai sebuah film yang akan mengupas sejarah Islam di Nusantara bersama para sejarawan. Teks itu disusul daftar sejarawan yang jadi narasumber. Sejarawan yang disebut pertama adalah Nicko Pandawa, sutradara dokumenter ini. Narasi dimulai dari kisah wafatnya Rasulullah Muhammad saw. yang direspon umat Islam sekelilingnya dengan segera berembuk mencari pengganti beliau. Saking pentingnya mencari khalifah atau pemimpin baru ini, film ini menekankan bahwa urusan pemakaman Rasulullah saja sampai diduakan.

Dari peristiwa Rasulullah wafat, berlanjut ke sejarah berbagai kekhalifahan, berujung pada cerita kekhalifahan Islam terakhir, yakni Kekhalifahan Utsmani yang berdurasi 1.300 tahun. Narasi lalu beralih ke pernyataan deduktif bahwa khilafah bukan hal baru di Nusantara. Buktinya ada pada hubungan antara kesultanan Islam di Nusantara dengan Kekhalifahan Turki Utsmani dan wilayah Arab lainnya sejak abad ketujuh.

Disinilah inti cerita dimulai: mencari bukti hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani dengan kesultanan Islam di Nusantara. Tapi mula-mula kita harus berkenalan dulu dengan suatu negeri yang dikenal sebagai Nusantara. Sebelum Islam masuk, negeri ini diklaim tengah berada dalam

masa kegelapan. Penulis ingin menjelaskan sedikit sinopsis film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara:

### 1. Sejarah Khilafah dengan Nusantara

Nicko Pandawa seorang sejarawan dan pembuat Film Jejak Khilafah di Nusantara menceritakan awal mula Khilafah Islamiyah di Turki yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Nusantara pada masa Khalifah Utsman. Di tahun 1404 M (808 H), seorang Khalifah Utsman Sultan Muhammad I mengirim seorang utusan kepada pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah untuk meminta sejumlah ulama untuk diberangkatkan ke Jawa. Akhirnya, diberangkatlah para ulama dalam enam angkatan yang terdiri sembilan orang dalam setiap angkatan. Angkatan I dipimpin langsung oleh Maulana Malik Ibrahim. Demikianlah cerita yang ada pada film tersebut dan sumber cerita tersebut dari kitab Kanzul 'Ulum karya Ibnu Bathuthah.

Sang sutradara juga mengatakan bahwa Khalifah Utsman mengirim utusan ke Cina lewat Nusantara yang diketahui dari adanya makam sejarah di Lhoekseumawe, daerah Aceh Utara yang merupakan terdapat pemakaman keturunan Abbasiyah. Terdapat tiga orang bani abbasiyah yang diketahui dimakamkan di aceh yakni yang pertama Shadrul Akabir Abdullah bin Muhammad al-Abbasi keturunan khalifah al-Mustanshir Billah. Kedua istrinya Siti Rohiman binti Malikul Muaadhom dan ketiga anaknya Sodrul Akabir Yusuf bin Abdulloh al-Abbasi mereka bertiga

dimakamkan di kompleks yang sama. “Ada kompleks makam di Aceh Utara yang isinya seorang pejabat kesultanan Samudera Pasai dari keturunan Bani Abbasiyah dan mereka disinyalir pernah menjadi pejabat di Kesultanan Samudera Pasai”, ucap Nicko Pandawa, Sutradara Film Jejak Khilafah, dilansir dari isi film tersebut.

## 2. Mengakui Kebesaran Khilafah

Di tahun 660-749 M, pelabuhan-pelabuhan di Kerajaan Sriwijaya senantiasa menjadi titik transit setiap kapal yang hendak melanjutkan perjalanannya, tentu penguasa Sriwijaya akan menyadari keberadaan pelayar-pelayar muslim yang singgah di wilayah kekuasaannya. Sebagian besar penguasa di Nusantara saat itu masih beragama Hindu dan sudah mempercayai dan mengakui kebesaran khilafah yang menjadi super power dunia yakni khilafah.

Hubungan Nusantara dengan kekhalifahan dapat dibuktikan dengan adanya surat menyurat yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah pada masa Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Moflich Hasbullah dalam film tersebut mengatakan “fakta bahwa kerajaan maharaja Sri Indrawarman di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan daulah umayyah mengirim surat dua kali saat itu, di masa khalifah Bani Umayyah yang menunjukkan ada hubungan

kekhilafahan dengan nusantara dan secara historis yang sangat-sangat logis ketika itu *superpower* dunia adalah khilafah”.<sup>50</sup>

### 3. Kekhalifahan Islam Turki Utsmani

Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel ibukota Romawi Timur pada 1453 Masehi oleh Muhammad al-Fatih, hal tersebut membuat nama Turki melekat di hati umat Islam Nusantara. Sedangkan, nama yang terkenal bagi orang Turki adalah sebutan Nusantara. Saat itu supremasi politik Turki Utsmani menyebar ke seluruh daerah negara muslim, salah satunya yaitu Nusantara. Kekhalifahan Turki Utsmani memperkuat politik dan militernya di abad ke-16, saat itu Turki Utsmani menjadi seorang penjaga dua tanah haram, yakni Makkah dan Madinah.

### 4. Mengamankan Perjalanan Haji

Tahun 954-1538 seorang Sultan Sulaiman melepas armada untuk membebaskan pelabuhan dengan tujuan mengamankan pelayaran haji ke Jeddah. Turki Utsmani mengamankan rute haji dari Sumatera ke Samudera Hindia. Berlanjut dengan munculnya berita adanya pelepasan armada Utsmani dengan tujuan membebaskan Muslim Malaka dari penjajahan kafir, tentunya hal tersebut menjadi kabar bahagia bagi umat Islam di seluruh dunia.

### 5. Hubungan Demak dengan kekhalifahan

---

<sup>50</sup> Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WQW0D3vLR4g&t=713s>. Di akses pada 3 September 2021



Khalifah Shadrul Akabir Abdullah Al-Abbasiyah beserta istrinya yang bernama Siti Rohiman dan anaknya yang bernama Shadrul Akabir Yusuf yang ikut menuliskan sejarah perjuangan membantun sultan zainal dalam menaklukkan wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya. Pada akhirnya Sultan Mansur yang merupakan putra dari Sultan Zainal menguasai Darul Islam Malaka dan mempunyai juru dakwah guna para pemimpin lainnya di Nusantara bisa menerima Islam.

Di antara juru dakwahnya yakni Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang dikirimkan ke wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik adalah pengembang dakwah di tanah Jawa dengan sebutan walisongo ini menginisiasi berdirinya ajaran Islam di tanah Jawa. Saat itu Majapahit sebagai pusat pemerintahan dan pejabatnya mau masuk Islam diantaranya yakni Pangeran Jimbun atau biasa dikenal dengan Raden Patah. Sehingga saat itu juga Raden Patah memproklamirkan Kesultanan Demak sebagai Daulah Islam pertama yang ada di Jawa dan menyebar di wilayah Nusantara lainnya seperti Brunei, Semenanjung Malaya, hingga Kesultanan Ternate.

## 6. Khilafah Turki di Aceh

Sultan Alauddin Riayat Syah memberikan petisi kepada Sultan Sulaiman al-Qanuni yang mengakui bahwa Utsman seorang Khalifah Islam, dalam petisi tersebut juga dituliskan adanya bantuan Utsmani yang melindungi umat muslim dari serangan Portugis. Sultan Alauddin Riayat

Syah al-Kahar aceh melancarkan serangan besar-besaran ke malaka demi menghancurkan portugis, serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537 15 64 dan 1568 pada serangan yang ketiga di tahun 1568 armada raksasa berkekuatan 15.000 al ghozi aceh, 400 Janissari (pasukan elite kesultanan turki) dari khilafah utsmaniyah dan 200 meriam monster karya para ahli senjata utsmaniyyah berangkat ke malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar.

Portugis yang bercokol di Malaga benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan aceh. Dari kejadian tersebut, hubungan antara pemimpin Aceh dan Turki semakin dekat. Hubungan antara Aceh dengan Utsmani juga terus berkelanjutan, saat itu mulai ada izin pengibaran bendera Turki berkibar di atas kapal Aceh.<sup>51</sup>

Dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara juga terdapat salah satu segmen yang mengisahkan bahwa Pangeran Diponegoro mendapatkan perintah langsung untuk mendirikan Kekhilafahan di Jawa. Hal ini didukung oleh Khilafah Turki Utsmani dengan memberikan bantuan kepada Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Oleh karena itu, anggapan atau narasi seperti ini dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara mendapatkan kritikan oleh Peter Carey dan dianggap sebuah kebohongan dan fitnah belaka.

---

<sup>51</sup> Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WQW0D3vLR4g&t=713s>. Di akses pada 3 September 2021

## **B. Kontroversi Film Jejak Khilafah Di Nusantara**

### **1. Pro Terhadap Film Jejak Khilafah Di Nusantara**

Sejak pertama kali ditayangkan film ini memang mengundang antusiasme yang begitu luar biasa dari masyarakat, hal ini dapat dibuktikan pada saat film tersebut ditayangkan secara live di media sosial Youtube telah ditonton oleh 63 ribu orang, namun beberapa saat kemudian link yang dibagikan untuk menonton film tersebut secara tiba-tiba tidak dapat diakses. Hal ini lantaran adanya keluhan hukum dari pemerintah.

Film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara ini sempat trending topik di twitter Indonesia. Netizen pun yang meramaikan Twitter dengan membuat tagar film tersebut mengajak warganet untuk turut menonton film tersebut, sehingga sebagian dari mereka membagikan sebuah cupilkan video dokumeter tersebut. Akan tetapi film dokumenter yang di tayangkan secara *live* atau langsung itu mendadak tidak bisa di putar dengan alasan munculnya sebuah tulisan di layar "*Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah*".

Akun yang bernama Ade Jawabi kemudian mengunggah ulang film tersebut menggunakan judul yang berebeda, tetapi hasilnya tetap saja tidak ada perubahan, link film tersebut masih tetap tidak dapat diakses. Akibat terjadinya pemblokiran tersebut pemerintah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Tengku Zulkarnain yang pada waktu

itu menjadi bagian dari Wasekjen MUI meminta kepada Presiden memberikan alasan mengapa film tersebut diblokir penayangannya.

“Dengan ini saya meminta jawabab resmi dari pak @jokowi sebagai Presiden RI, Kyai Maruf Amin dan pak @mohmahfudmd: Apa alasan keluhan pemerintah atas video Jejak Khilafah sebagai sejarah? Apakah ada hukum negara yang dilanggar? NKRI negara hukum, tidak boleh sewenang-wenang,” kata tengku.

Sebelum Film Jejak Khilafah di Nusantara tayang, warganet disuguhkan dahulu dengan talk show secara streaming bersama para tokoh pembicara, antara lain yakni Ismail Yusanto (penasihat Komunitas Literasi Islam), Nicko T. Pandawa (produser sekaligus penulis naskah Jejak Khilafah di Nusantara), dan Septian A. W. (sejarawan muda), dan tokoh yang lainnya, termasuk Peter Carey. Dalam *talkshow* tersebut, Septian menyebut salah satu latar belakang film ini diproduksi adalah untuk menjawab tantangan zaman karena Khilafah telah menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

Septian beserta tim lainnya merasa terketuk untuk bisa menghadirkan riwayat atau kisah tentang khilafah di Nusantara ke tengah masyarakat Indonesia lewat film dokumenter ini. “Kita ingin menampilkan kisah tersebut dalam format yang lebih menarik, yakni berupa audio-visual, film dokumenter,” ujarnya.

Sementara itu, Ismail Yusanto juga mengatakan “Jika sejarah itu benar, maka *ibrah* atau pelajaran yang akan didapat adalah benar. Namun jika sejarah itu ditulis salah, maka *ibrah* yang akan didapatkan adalah salah,” demikian tutur Ismail Yusanto dalam *talkshow* peluncuran film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara pada hari Kamis, 20 Agustus 2020, di saluran streaming Khilafah Channel. Ismail Yusanto menjelaskan perihal sejarah dalam pandangan Islam. Ia menjelaskan bahwa sejarah adalah objek pemikiran, maka sejarah menjadi pelengkap atau pendukung dari sebuah ajaran.<sup>52</sup>

“Dalam hal ini Khilafah, yakni sebuah ajaran Islam yang kemudian melihat bagaimana sejarah Khilafah, khususnya di Nusantara,” jelas penasihat Komunitas Literasi Islam. Komunitas Literasi Islam sendiri adalah pihak yang bekerja sama dengan Khilafah Channel dalam produksi ini. Sehingga ada atau tidak adanya hubungan dalam sejarah tersebut, misalnya, tetap tidak bisa menunjukkan bahwa Khilafah itu tidak ada, karena Khilafah itu adalah ajaran Islam. “Orang mengatakan sejarah itu *“second hand reality”*, yakni bergantung siapa yang menuturkan. Itu tidak terlepas dari latar belakang politik, pengaburan dan penguburan sejarah,” ujarnya. Maka, ada pesan penting yang disampaikan Ismail Yusanto, bahwa sejarah digunakan untuk menggali kebenaran.

---

<sup>52</sup> “Digging Up the Truth” melalui Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.muslimahnews.com/2020/08/20/digging-up-the-truth-melalui-film-jejak-khilafah-di-nusantara/>. Diakses pada 13 Agustus 2021

Dalam Launching Film Jejak Khilafah di Nusantara, Ismail yusanto menunjukkan pada masyarakat dengan mengatakan “Film ini merupakan film yang valid secara historis, film ini mengandung bukti sejarah yang faktual, bukti sejarah ada dua yakni bukti fisik sejarah atau mungkin sumber dari para sejarawan, karena itulah menyaksikan film ini itu seperti kita menyaksikan bukti bukti dari keberadaan jejak khilafah di nusantara ini”

Rokhmat S. Labib dalam Talkshow launchingnya film tersebut juga mengatakan bahwa “Film ini merupakan Film tentang Dakwah, kalo secara konsepsi Khilafah ini mempunyai dua tugas yakni melaksanakan dan menerapkan hukum Islam di negeri ini, yang kedua keluar negeri itu dengan jalan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Khilafah dalam film tersebut juga menunjukkan bahwa khilafah itu melindungi umat islam”<sup>53</sup>

Selain itu, banyak tanggapan lain dari kyai atau ustadz yang pro terhadap Film Jejak Khilafah di Nusantara terdapat dalam media sosial Youtube, salah satunya yakni dari KH. Harun Ar Rasyid dalam Liwa Channel yang mengatakan bahwa “Mudah mudahan Film Jejak Khilafah di Nusanata menginspirasi kita untuk berjuang mengembalikan kekhilafahan agar memimpin kembali dunia sehingga tercipta keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan rahmatan lil ‘alamin”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Talk Show Launching Film Jejak Khilafah Di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=xLvakK08o1c>. Diakses pada 12 Januari 2022

<sup>54</sup> KH. Harun ArRasyid : Film Jejak Khilafah DI Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=Y0OfsVMzEC0>. Diakses pada 12 Januari 2022

## 2. Kontra Terhadap Film Jejak Khilafah Di Nusantara

Akan tetapi, selain yang pro terhadap khilafah terdapat munculnya kontra terhadap soal narasi film tersebut yang diluncurkan pada Tahun Baru Islam diklaim sebagai film sejarah yang mendekati sebuah khayalan untuk kepentingan propaganda ketimbang dokumenter. Materi dari film dokumenter tersebut yang sama sekali tidak didukung data atau arsip kesejarahan yang valid antara lain terkait hubungan Diponegoro maupun kesultanan-kesultanan Islam di Jawa sebelumnya Turki Utsmani.

Film yang mengandung kontroversi tersebut sempat di sanggah oleh tokoh sejarawan Indonesia yakni Prof. Azzumardi Azra, yang mengatakan bahwa “Film dokumenter “Jejak Khilafah di Nusantara” itu hanyalah khayalan belaka dan tidak ada jejak khilafah pada bumi Nusantara (Indonesia)”.



Gambar 3.2: Tanggapan terhadap Film Jejak Khilafah di Nusantara

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=IeGrIjaRK8c>

Dalam video diatas, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa tidak ada jejak khilafah di kepulauan Nusantara, yang ada hanyalah kerajaan, yang



ada itu kesultanan. Kalau ada yang bilang bahwa kerajaan Demak itu khilafah atau dinasti Utsmani disebut khilafah itu juga salah. Hal ini karena Utsmani merupakan kesultanan (dinasti) bukan khilafah Utsmani. Memang ada kerajaan di kepulauan Nusantara ini yang berhubungan dengan Turki Utsmani, akan tetapi tidak juga mereka menjadi negara jajahan atau taklukkan dan pengikut dari Turki Utsmani. Maka kerajaan-kerajaan di Indonesia ini independent atau hubungan dan keterkaitan dengan kerajaan lain yang ada di Nusantara ini, jadi bukan fasalistik dari entitas pengikut lain. Seperti halnya sultan Mataram yang mendapatkan gelar khalifatullah sayyidin panotogomo, dan disini khalifatullah itu berhubungan dengan syarif Makkah yang tidak ada hubungannya dengan khilafah. Jadi intinya tidak ada hubungan diplomatik dan politik dengan Turki Utsmani di Kepulauan Nusantara.<sup>55</sup>

Selain itu terdapat sanggahan lain dari tokoh ahli filologi bidang Islam yakni Prof. Oman Fathurrahman terdapat pada salah satu media channel youtube Agama Akal TV yang mengatakan bahwa ada enam kejanggalan yang ada pada Film Jejak Khilafah di Nusantara yakni *pertama*, pada penayangan film tersebut tidak melibatkan pakar manuskrip dan arkeologi sebagai narasumber. *Kedua*, memakai nama Nusantara padahal yang dibidik oleh film tersebut adalah hanya Indonesia dan Nusanatara sendiri itu luas sampai Singapura, Malaysia, dan Brunei. *Ketiga*, pada penayangannya tidak sama sekali menyinggung eksistensi

---

<sup>55</sup> Dosa Besar Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=leGrIjaRK8c>. Diakses pada 13 Januari 2022



dari kesultanan Cirebon padahal kesultanan Cirebon adalah jika dianalisis terdapat keterkaitan dengan Sunan Gunung Jati. *Keempat*, Film tersebut mengungkap temuan adanya koin emas di Gampong Pande, kota Banda Aceh, akan tetapi dalam film tersebut tidak memaparkan asal mula koin tersebut di bawa dan di gunakan untuk apa koien emas tersebut. *Kelima*, Film tersebut tidak konsisten, karena memakai kata khilafah tetapi yang dibahas adalah kerajaan Islam yang sudah berbentuk dinasti, oleh karena itu jika yang dibahas dinasti maka gelarnya yang benar adalah Sultan. *Keenam*, Film tersebut menyinggung Maulana Malik Ibrahim, harusnya jika menyinggung salah satu Walisongo maka harus menyuguhkan data yang valid tentang relasi antara walisongo dengan Sultan Turki Utsmani.<sup>56</sup>

Film Jejak Khilafah di Nusantara di mulai dari merajut perjalanan sejarah khilafah dari periode para sahabat empat atau Khulafaur Rasyidin, Dinasti Abbasiyah, dan Kesultanan Turki Usmani. Proyeksi narasinya dibatasi antara tahun 632-1560-an. Dalam bentangan waktu ini, Film Jejak Khilafah di Nusantara merajut narasi khalifahnya melalui carik-carik bukti primer sejarah, dari Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Wali Songo, Demak dan Ternate.

Meskipun dari data makam dan diplomasi dari Aceh terpapar jelas dan autentik hubungannya dengan dinasti Abbasiyah dan Turki, basis narasi dari Demak dan Ternate dipercaya hanya berasal dari dugaan semat-

---

<sup>56</sup> Khilafah di Nusantara, Benarkah Ada Jejaknya? - Dialog Sejarah | HISTORIA.ID, lihat dalam [https://www.youtube.com/watch?v=kB\\_vfw36lLw&t=660s](https://www.youtube.com/watch?v=kB_vfw36lLw&t=660s). Diakses pada 15 Januari 2022

menyemat sebagaimana yang diyakini oleh pakar sejarawan yakni Peter Carey dan Ismail Hakki Kadi. Hal inilah yang merupakan problem utama narasi Film Jejak Khilafah di Nusantara soal khilafah di Nusantara.

Problem lainnya terkait eksklusivitas narasumber yang tidak relevan. Para narasumber terkesan eksklusif, misalnya pentolan Hizbut Tahrir Indonesia yang organisasinya telah dibubarkan tahun 2017. Dalam film tersebut, tidak ada sejarawan Turki dan sejarawan senior Indonesia atau Internasional yang dilibatkan. Maka, tidak heran jika penemuannya mengacu pada hasil “*premature*” alias pemaksaan. Salah satu pemaksaan paling nyata yang terlihat adalah penekanan kata “Padisah” yang diartikan khalifah dalam surat Sultan Aladdin Riayat Syah al Qahhar pada Sultan Sulaiman Sang Penakluk tahun 1566. Sultan, Padisah, dan Khalifah adalah 3 kategori kekuasaan yang berbeda.



Gambar 3.3: Poser Talkshow Launching Film jejak Khilafah di Nusantara

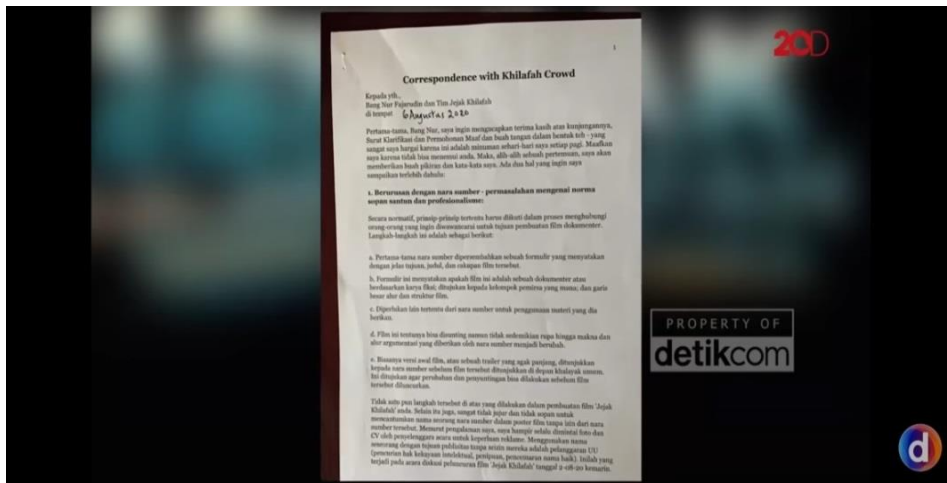
Peter Carey yang telah meneliti kerajaan Jawa yakni Perang Jawa atau Perang Diponegoro selama lebih dari 40 tahun itu keberatan atas

pencatutan dirinya tanpa persetujuan dalam film tersebut. Peter Carey juga tak pernah diberitahu jika hasil wawancara itu ditujukan untuk proyeksi sebuah film. Peter Carey mengakui bahwa dirinya sempat dimintai wawancara untuk menjelaskan tentang Perang Diponegoro yang telah ditelitinya, namun itu ditujukan untuk meluruskan fakta bahwa hubungan langsung Turki Utsmani dan dengan Pengeran Diponegoro yang ternyata tidak ada, hanya saja terdapat kekaguman jarak jauh Pangeran Diponegoro terhadap Kekhalifahan Utsmani di Turki. Maka dari itu Pangeran Diponegoro menggunakan nama pasukan Turki untuk menamai pasukan perangnya.

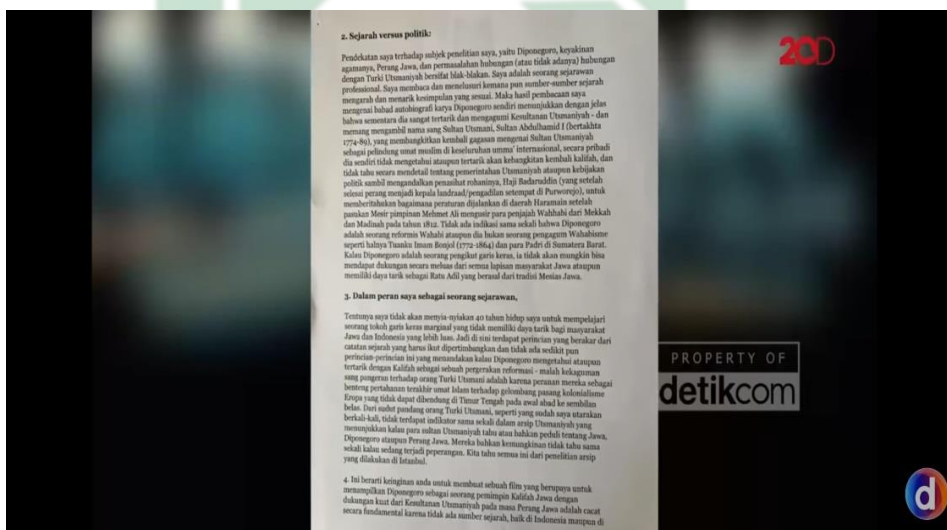
“sangat tidak jujur dan tidak sopan untuk mencantumkan nama seorang narasumber dalam poster film tanpa izin dari narasumber tersebut, menurut pengalaman saya, saya hampir selalu dimintai foto dan CV oleh penyelenggara acara untuk keperluan reklama,” kata Peter Carey dalam keterangan tertulis yang dibagikan oleh akun Twitter Christopher Reinhart, seorang asisten Cardiff Professor dan Oxford Professor.<sup>57</sup>

---

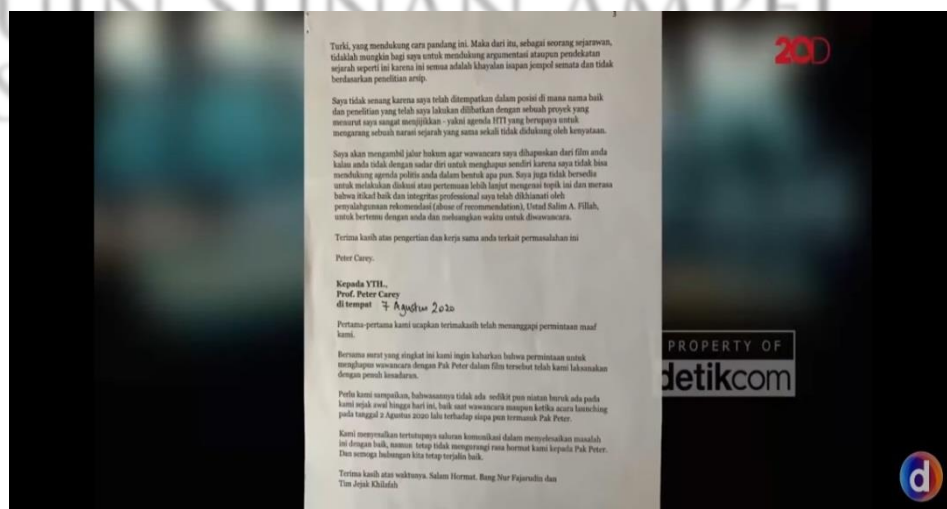
<sup>57</sup> Namanya Dicatut dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara, Peter Carey Protes, lihat dalam <https://www.suara.com/news/2020/08/10/153240/namanya-dicatut-dalam-film-jejak-khilafah-di-nusantara-peter-carey-protos?page=all>. Diakses pada 24 September 2021



Gambar 3.4



Gambar 3.5



Gambar 3.6

Gambar 3.3 s.d 3.5: Korespondensi Peter Carey terhadap Tim Film Jejak  
Khilafah di Nusantara

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Sa3JVSGH3F0>

Dalam keterangan pers yang sudah terkonfirmasi di atas, Christopher selaku asistennya menjelaskan dirinya ingin meneruskan atas permintaan Peter Carey dan informasi lanjutan mengenai klaim adanya hubungan antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa.

Sejarawan Inggris yang bernama Peter Carey telah mengkonfirmasi dan meluruskan klaim adanya hubungan antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan Kesultanan Islam di Jawa dengan mengirimkan surel kepada ahli sejarah bagian hubungan Utsmaniyah dan Asia Tenggara yakni Dr. Ismail Hakki Kadi pada tanggal 16 Agustus 2020, yang di balas pada tanggal 18 Agustus 2020. Dari surel itu menegaskan dan membantah bahwa kekhalifahan Turki Utsmani tidak memiliki hubungan dengan Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa, seperti yang diklaim dalam narasi Film Jejak Khilafah di Nusantara.

Dalam pernyataan Peter Carey sebagaimana keterangan tertulis di atas, tidak ada pula terdapat dokumentasi pada era Turki Utsmani yang menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan atau kontak dengan raja pertama Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah yang bertakhta pada tahun 1475 sampai 1518. “Kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal (bawahan) atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga

bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa”, demikianlah penjelasan dari Peter Carey yang di korespondensikan dengan Dr. Ismail Hakki Kadi, peneliti sejarah yang mengulik dokumen arsip Utsmani di Istanbul.

Peter Carey juga menuturkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749), termasuk tidak adanya bukti dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa panji Tunggul Wulung yang merupakan bukti bahwa Yogyakarta adalah salah satu wakil dari Turki Utsmani di Jawa. Hal ini juga berdasarkan data penelitian kearsipan Dr. Ismail Hakki Kadi.<sup>58</sup>

Dr Ismail Hakki Kadi akan menjelaskan bahwa jika ada satu saja dari legenda-legenda seperti di atas yang tentunya memiliki dukungan bukti sejarah, pasti akan memasukkannya ke dalam hasil penelitiannya yang terbaru, yang beliau sunting bersama dengan Prof A C S Peacock dari Universitas St Andrew’s di Skotlandia yang berjudul Ottoman-Southeast Asian Relations; Sources from the Ottoman Archives (Leiden: Brill, 2019), dua jilid.<sup>59</sup>

Di antara klaim lain dalam film dokumeter tersebut disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro pernah melakukan adanya hubungan kontak dengan Ottoman. Menurut Peter Carey, sudah tidak diragukan lagi kalau

---

<sup>58</sup> Blak-blakan Peter Carey: Jejak Khilafah Itu Propaganda Bukan Sejarah!, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=Sa3JVSGH3F0>. Diakses pada 13 September 2021

<sup>59</sup> Bantahan Pakar Atas Klaim Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.republika.co.id/berita/qfd5bz320/bantahan-pakar-atas-klaim-film-jejak-khilafah-di-nusantara>. Diakses pada 20 September 2021

banyak orang Jawa termasuk Diponegoro yang kagum dengan Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-18 dan ke-19.

Hal ini di tandai dengan penggunaan nama Turki Utsmani oleh Diponegoro yang inovatif dan radikal yakni "*Bulkio*" berasal dari bahasa Turki "*boluk*" yang artinya regu untuk pasukan elite paswal-nya, sedangkan untuk penggunaan pangkat Turki, *Ali Pasya* atau "*Pasha Agung*" untuk panglimanya, Sentot Ali Basya Abdullah Mustafa Prawirodirjo adalah seorang panglima perang pada masa Perang Diponegoro, *Pasha* atau *Basyah* yang berarti Komandan Senior dan "*Dullah*" yang berarti Komandan Junior untuk perwira lapangannya.<sup>60</sup>

Dalam keterangan tertulis di atas, Peter Carey dalam sumber karyanya yakni Babad Diponegoro menuturkan bahwa Diponegoro sendiri mengambil nama Ngabdul hamid dari seorang sultan Utsmaniyah, yakni Abdul hamid I (bertakhta 1774-1789), seorang sultan yang pertama kali membangkitkan kembali klaim Utsmaniyah atas peran sebagai Khilafah atau pelindung umat Muslim di kesuluruhan 'umma Internasional atau seluruh dunia, yang mana peran tersebut kemudian diperluas penerus namanya, yakni Abdul hamid II yang bertakhta 1875-1908.<sup>61</sup>

Peter Carey menggarisbawahi yang sekarang terlihat sangat jelas adalah bahwa walaupun di pihak Jawa terdapat rasa kekaguman dan

---

<sup>60</sup> Peter Carey, *Kesatria dan Santri: Beberapa Catatan Tentang Hubungan Pendukung Keraton and Agamawi Diponegoro, Dari Babad dan Hikayat sampai sejarah Kritis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), 27

<sup>61</sup> Ibid., 29



kemauan untuk mengikuti praktik Utsmaniyah dan di dalam arsip Turki Utsmaniyah, akan tetapi sama sekali tidak ada catatan yang menandakan kalau para penguasa Turki dan pemerintah di sana mengetahui tentang apa yang terjadi di Jawa ataupun bahkan tentang nama Diponegoro, apalagi mengirimkan bantuan material ataupun moril untuk mendukung perjuangannya.

Tidak ada indikasi bahwa Pangeran Diponegoro merupakan pengikut garis keras reformis wahabi atau juga khilafah. Kalau Pangeran Diponegoro merupakan seorang pengikut khilafah maka tidak akan mungkin bisa mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat Jawa secara meluas bahkan memiliki daya tarik sebagai Ratu Adil yang berasal dari tradisi Mesias Jawa.<sup>62</sup>

Tak cuma itu dalam keterangan tertulis di atas pada poin nomor empat, soal isinya, Peter Carey mengkritik dan mengatakan bahwa pembuatan film yang berupaya menampilkan adanya hubungan khilafah di Turki Utsmani dengan kesultanan Islam di Jawa, yakni Pangeran Diponegoro sebagai seorang pemimpin Khalifah Jawa dengan dukungan kuat dari kesultanan Utsmaniyyah pada masa perang Jawa adalah cacat secara fundamental, karena Materi yang sama sekali tidak didukung data atau arsip atau sumber kesejarahan yang valid baik di Indonesia maupun di

---

<sup>62</sup> Klaim Khilafah di Nusantara, Diponegoro Kontak Ottoman?, lihat dalam <https://www.republika.co.id/berita/qfdzll320/klaim-khilafah-di-nusantara-diponegoro-kontak-ottoman>. Diakses pada 27 Oktober 2021



Turki antara lain terkait hubungan Diponegoro maupun Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa sebelumnya dengan Turki Utsmani.



Gambar 3.6: Siaran pers kritik Peter Carey terhadap Film Jejak Khilafah di Nusantara

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Sa3JVSGH3F0>

Pada video tersebut Peter Carey menuturkan bahwa tentunya beliau tidak akan menyia-nyiakan empat puluh tahun hidupnya untuk mempelajari seorang tokoh garis keras marginal yang tidak memiliki daya tarik bagi masyarakat Jawa dan Indonesia yang lebih luas. Jadi di dalam video tersebut terdapat perincian yang berakar dari catatan sejarah yang harus ikut dipertimbangkan dan tidak ada sedikitpun perincian ini yang menandakan kalau Diponegoro mengetahui ataupun tertarik dengan Khalifah sebagai sebuah pergerakan reformasi.

Kekaguman sang Pangeran Diponegoro terhadap orang-orang Turki Utsmani adalah karena peranan mereka sebagai benteng pertahanan teakhir umat Islam terhadap gelombang pasang kolonialisme Eropa yang tidak dapat dibendung di Timur Tengah pada awal abad ke 19. Dari sudut

pandang orang Turki Utsmani, seperti yang sudah Peter Carey utarakan berkali-kali, bahwa tidak terdapat indikator sama sekali dalam arsip Utsmaniyyah yang menunjukkan kalau para sultan Utsmaniyyah mengerti atau bahkan peduli dengan Jawa, Pangeran Diponegoro, ataupun Perang Jawa. Mereka bahkan kemungkinan tidak tahu sama sekali kalau sedang terjadi peperangan. Oleh karena itu menegaskan bahwa kita tahu semuanya ini dari penelitian arsip yang dilakukan di Istanbul.<sup>63</sup>

Menurut Peter Carey yang selama 40 tahun meneliti sejarah Jawa dan Diponegoro, setiap bantuan yang pernah diterima Diponegoro biasa dituliskan dalam babad. Ia mencontohkan adanya bantuan dari kerajaan di Buleleng Bali atau pasukan Bugis di Makassar. “Tapi Babad Diponegoro sama sekali tidak menyebutkan adanya bantuan dari Turki Utsmani, baik pasukan, persenjataan, atau sekadar dukungan moral,”<sup>64</sup> kata Peter kepada tim Blak-blakan detikcom.

Sebagaimana juga Peter Carey mendapat penjelasan dari koleganya di Istanbul, Turki, yakni Dr. Ismail Hakki Kadi yang meneliti banyak arsip di era Turki Utsmani bahwa tidak menemukan informasi adanya kontak antara Raden Patah (1475-1518) dari Demak dengan Turki Utsmani. “Film Jejak Khilafah ini dibuat tanpa punya pijakan kearsipan sejarah. Ini

---

<sup>63</sup> Blak-blakan Peter Carey: Jejak Khilafah Itu Propaganda Bukan Sejarah!, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=Sa3JVSGH3F0>. Diakses pada 3 November 2021

<sup>64</sup> Film Jejak Khilafah Diviralkan, Isinya Pun Disebut Khayalan, lihat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5151703/film-jejak-khilafah-diviralkan-isinya-pun-disebut-khayalan/3>. Diakses pada 28 November 2021

semacam khayalan,” tegas Peter Carey, yang menulis sejumlah buku terkait Perang Jawa dan Diponegoro.

Maka dari itu Film Jejak Khilafah di Nusantara pun ditangkap oleh sejarawan Profesor Peter Carey sebagai sebuah khayalan. Film ini disebut lebih mendekati sebuah khayalan karena tidak berdasarkan arsip dan hanya untuk kepentingan propaganda ketimbang dokumenter, yakni agenda dan proyek HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang berupaya untuk mengarang sebuah narasi sejarah yang tidak berdasarkan dan didukung oleh kenyataan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **Genealogi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara**

#### **A. Analisis Arkeologis Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film Jejak Khilafah Di Nusantara**

Dalam karya dan pemikirannya, Michel Foucault banyak membicarakan tentang hal-hal baru dan cenderung asing dengan mendefinisikan tentang praktek-praktek sebuah diskursif dalam pemahaman sejarah. Michel Foucault masuk dalam ranah tentang pemahaman sejarah selalu dari sudut pandang mikro dan secara kritis masuk dalam sejarah untuk membongkar kepalsuan dan kemungkinan akan rekayasa kekuasaan dalam penulisan sebuah sejarah dengan cara pendefisian ulang sejarah tersebut.

Peneliti akan membahas mengenai narasi dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara yang narasi sejarahnya mengandung kontroversi dari masyarakat terutama ahli sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontra dari kritikan beberapa ahli sejarah termasuk kritik dari sejarawan Peter Carey terhadap sumber dan narasumber yang ada pada Film Jejak Khilafah di Nusantara.

Arkeologi pengetahuan Michel Foucault merupakan proses pencarian sistem umum melalui metode penyusunan dan transformasi dokumen pernyataan ke dalam bentuk diskursif. Tujuannya adalah untuk membahas sejarah pemikiran secara murni tanpa terikat teori-teori yang

mengekangnya, dan justru bertujuan mengetahui bagaimana teori-teori tersebut pada mulanya terbentuk.

Michel Foucault mendefinisikan arkeologi sebagai bentuk eksplorasi terhadap kondisi historis yang spesifik dengan mengkombinasikan berbagai pernyataan untuk membentuk suatu kasus pengetahuan. Setiap objek historis yang berubah tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama, ini yang menyebabkan mengapa diskursus selalu bersifat diskontinu.

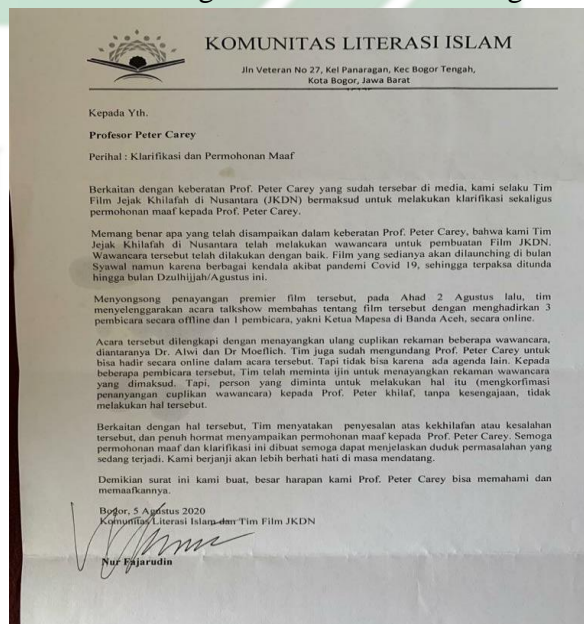
Untuk menentukan definisi diskursus, maka dalam tulisan ini fokusnya adalah untuk melakukan analisis pendefinisian terhadap kritik Peter Carey dalam diskursus Islamisme yang tersirat di balik film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara. Dalam proses analisis arkeologi pengetahuan Michel Foucault, maka pendefinisian terhadap kritik Peter Carey akan dilakukan melalui tiga aspek yaitu; melakukan pemetaan kemunculan, mendeskripsikan otoritas pembatasan dan melakukan analisa terhadap jaringan spesifikasi.

Aspek pertama adalah pemetaan kemunculan. Kemunculan kritik Peter Carey terhadap film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara akan diidentifikasi melalui beberapa elemen dalam metode arkeologi pengetahuan Foucault yaitu identifikasi pernyataan, diskursus, relasi, subjek pernyataan dan eksistensi material sebagai media kemunculan kritik Peter Carey.

Dalam tulisan ini elemen elemen yang muncul bersifat kompleks, terdapat dua pernyataan, dua diskursus, dua subjek pernyataan dan dua eksistensi material yang membentuk satu relasi. Pernyataan kritik Peter Carey muncul karena adanya pernyataan lain yaitu pernyataan yang secara runtut berada dalam narasi dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara. Pernyataan Peter Carey tersebut adalah pernyataan yang disampaikan dalam video eksklusif “Blak-Blakan” channel YouTube detikcom bahwa nama Peter Carey telah dicatut dalam pembuatan film tersebut.

“Dr. Ismail Hakki Kadi menegaskan, dari asrsip-arsip yang dipelajarinya tidak ada kontak antara Raden Patah (1475-1580) dari Demak dengan Turki. Yang paling pokok adalah ini bukan film sejarah, ini film propaganda”<sup>65</sup>

Menanggapi keberatan Peter Carey, tim film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara mengirim surat balasan sebagaimana berikut:



<sup>65</sup> Klaim Khilafah di Nusantara, Diponegoro Kontak Ottoman?, lihat dalam <https://www.republika.co.id/berita/qfdzll320/klaim-khilafah-di-nusantara-diponegoro-kontak-ottoman>. Diakses pada 18 Januari 2022

Tidak berhenti demikian, surat tersebut kembali diberi tanggapan oleh Peter Carey sebagaimana secara rinci dituliskan kembali oleh Christopher Reinhart yang merupakan asisten Peter Carey dalam akun twitternya pada 10 Agustus 2020, sebagai berikut:

[Tanggapan Prof. Peter Carey atas Surat Permintaan Maaf Tim Jejak Khilafah (yang dikirimkan kepada beliau)]

\*) Tanggapan ini telah saya mintakan izin publikasi kepada Prof. Carey

“Kepada yth., Bang Nur Fajarudin dan Tim Jejak Khilafah

di tempat

Pertama-tama, Bang Nur, saya ingin mengucapkan terima kasih atas Surat Klarifikasi. Maafkan saya karena tidak bisa menemui Anda. Maka, alih-alih sebuah pertemuan, saya akan memberikan buah pikiran dan kata-kata saya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu:

1. Berurusan dengan narasumber - permasalahan mengenai norma sopan santun dan profesionalisme: Secara normatif, prinsip-prinsip tertentu harus diikuti dalam proses menghubungi orang-orang yang ingin diwawancarai untuk tujuan pembuatan film dokumenter.

Langkah-langkah ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertama-tama, narasumber dipersembahkan sebuah formulir yang menyatakan dengan jelas tujuan, judul, dan cakupan film tersebut.
- b. Formulir ini menyatakan apakah film ini adalah sebuah dokumenter atau berdasarkan karya fiksi; ditujukan kepada kelompok pemirsa yang mana; dan garis besar alur dan struktur film.
- c. Diperlukan izin tertentu dari narasumber untuk penggunaan materi yang dia berikan.



- d. Film ini tentunya bisa disunting namun tidak sedemikian rupa hingga makna dan alur argumentasi yang diberikan oleh narasumber menjadi berubah.
- e. Biasanya, versi awal film atau sebuah trailer yang agak panjang, ditunjukkan kepada narasumber sebelum film tersebut ditunjukkan di depan khalayak umum. Ini ditujukan agar perubahan dan penyuntingan bisa dilakukan sebelum film tersebut diluncurkan.

Tidak satu pun langkah tersebut di atas yang dilakukan dalam pembuatan film 'Jejak Khilafah' Anda. Selain itu sangat tidak jujur dan tidak sopan untuk mencantumkan nama seorang narasumber dalam poster film tanpa izin dari narasumber tersebut. Menurut pengalaman saya, saya hampir selalu dimintai foto dan CV oleh penyelenggara acara untuk keperluan reklame. Menggunakan nama seseorang dengan tujuan publisitas tanpa seizin mereka adalah pelanggaran undang-undang (pencurian hak kekayaan intelektual, penipuan, pencemaran nama baik).

Inilah yang terjadi pada acara diskusi peluncuran film 'Jejak Khilafah' tanggal 2 Agustus kemarin.

2. Sejarah versus politik: Pendekatan saya terhadap subjek penelitian saya, yaitu Diponegoro, keyakinan agamanya, Perang Jawa, dan permasalahan hubungan (atau tidak adanya) hubungan dengan Turki Utsmaniyah bersifat blak-blakan. Saya adalah seorang sejarawan profesional. Saya membaca dan menelusuri ke mana pun sumber-sumber sejarah mengarah dan menarik kesimpulan yang sesuai. Maka, hasil pembacaan saya mengenai babad autobiografi karya Diponegoro sendiri menunjukkan dengan jelas bahwa sementara dia sangat tertarik dan mengagumi Kesultanan Utsmaniyah - dan memang mengambil nama sang Sultan Utsmani, Sultan Abdulhamid I (bertakhta 1774-89), yang membangkitkan kembali gagasan mengenai Sultan Utsmaniyah sebagai pelindung umat muslim di keseluruhan umma' internasional, secara pribadi dia sendiri tidak mengetahui ataupun tertarik akan



kebangkitan kembali khalifah, dan tidak tahu secara mendetail tentang pemerintahan Utsmaniyah ataupun kebijakan politik sambil mengandalkan penasihat rohaninya, Haji Badaruddin (yang setelah selesai perang menjadi kepala landraad/pengadilan setempat di Purworejo), untuk memberitahukan bagaimana peraturan dijalankan di daerah Haramain setelah pasukan Mesir pimpinan Mehmet Ali mengusir para penjajah Wahhabi dari Mekkah dan Madinah pada tahun 1812.

Tidak ada indikasi sama sekali bahwa Diponegoro adalah seorang reformis Wahabi ataupun dia bukan seorang pengagum Wahabisme seperti halnya Tuanku Imam Bonjol (1772-1864) dan para Padri di Sumatra Barat. Kalau Diponegoro adalah seorang pengikut garis keras, ia tidak akan mungkin bisa mendapat dukungan secara meluas dari semua lapisan masyarakat Jawa ataupun memiliki daya tarik sebagai Ratu Adil yang berasal dari tradisi Mesias Jawa.

3. Dalam peran saya sebagai seorang sejarawan: Tentunya saya tidak akan menyia-nyiakan 40 tahun hidup saya untuk mempelajari seorang tokoh garis keras marjinal yang tidak memiliki daya tarik bagi masyarakat Jawa dan Indonesia yang lebih luas. Jadi, di sini terdapat perincian yang berakar dari catatan sejarah yang harus ikut dipertimbangkan dan tidak ada sedikit pun perincian-perincian ini yang menandakan kalau Diponegoro mengetahui ataupun tertarik dengan khalifah sebagai sebuah pergerakan reformasi - malah kekaguman sang pangeran terhadap orang Turki Utsmani adalah karena peranan mereka sebagai benteng pertahanan terakhir umat Islam terhadap gelombang pasang kolonialisme Eropa yang tidak dapat dibendung di Timur Tengah pada awal abad ke sembilan belas.

Dari sudut pandang orang Turki Utsmani, seperti yang sudah saya utarakan berkali-kali, tidak terdapat indikator sama sekali dalam arsip Utsmaniyah yang menunjukkan kalau para sultan Utsmaniyah tahu atau bahkan peduli tentang Jawa, Diponegoro, ataupun Perang Jawa. Mereka

bahkan kemungkinan tidak tahu sama sekali kalau sedang terjadi peperangan. Kita tahu semua ini dari penelitian arsip yang dilakukan di Istanbul.

4. Ini berarti keinginan Anda untuk membuat sebuah film yang berupaya untuk menampilkan Diponegoro sebagai seorang pemimpin Khalifah Jawa dengan dukungan kuat dari Kesultanan Utsmaniyah pada masa Perang Jawa adalah cacat secara fundamental karena tidak ada sumber sejarah, baik di Indonesia maupun di Turki, yang mendukung cara pandang ini. Maka dari itu, sebagai seorang sejarawan, tidaklah mungkin bagi saya untuk mendukung argumentasi ataupun pendekatan sejarah seperti ini karena ini semua adalah khayalan isapan jempol semata dan tidak berdasarkan penelitian arsip. Saya tidak senang karena saya telah ditempatkan dalam posisi di mana nama baik dan penelitian yang telah saya lakukan dilibatkan dengan sebuah proyek yang menurut saya sangat menjijikkan - yakni agenda HTI yang berupaya untuk mengarang sebuah narasi sejarah yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan. Saya akan mengambil jalur hukum agar wawancara saya dihapuskan dari film Anda kalau Anda tidak dengan sadar diri menghapus sendiri karena saya tidak bisa mendukung agenda politis Anda dalam bentuk apa pun. Saya juga tidak bersedia untuk melakukan diskusi atau pertemuan lebih lanjut mengenai topik ini dan merasa bahwa itikad baik dan integritas profesional saya telah dikhianati oleh penyalahgunaan rekomendasi (*abuse of recommendation*) Ustad Salim A. Fillah, untuk bertemu dengan anda dan meluangkan waktu untuk diwawancara. Terima kasih atas pengertian dan kerja sama anda terkait permasalahan ini.

Peter Carey

Pernyataan oleh dua belah pihak ini kemudian berada di dalam dua diskursus yang berbeda. Meski terlihat dari luar bahwa pernyataan

keduanya sama-sama berada dalam diskursus sejarah, namun melalui identifikasi relasi yang terbentuk melalui subjek kedua pernyataan nantinya dapat terlihat bagaimana kedua pernyataan berada dalam diskursus yang berbeda. Untuk itu, berikut merupakan identifikasi subjek yang penulis analisa dari kedua pernyataan tersebut.

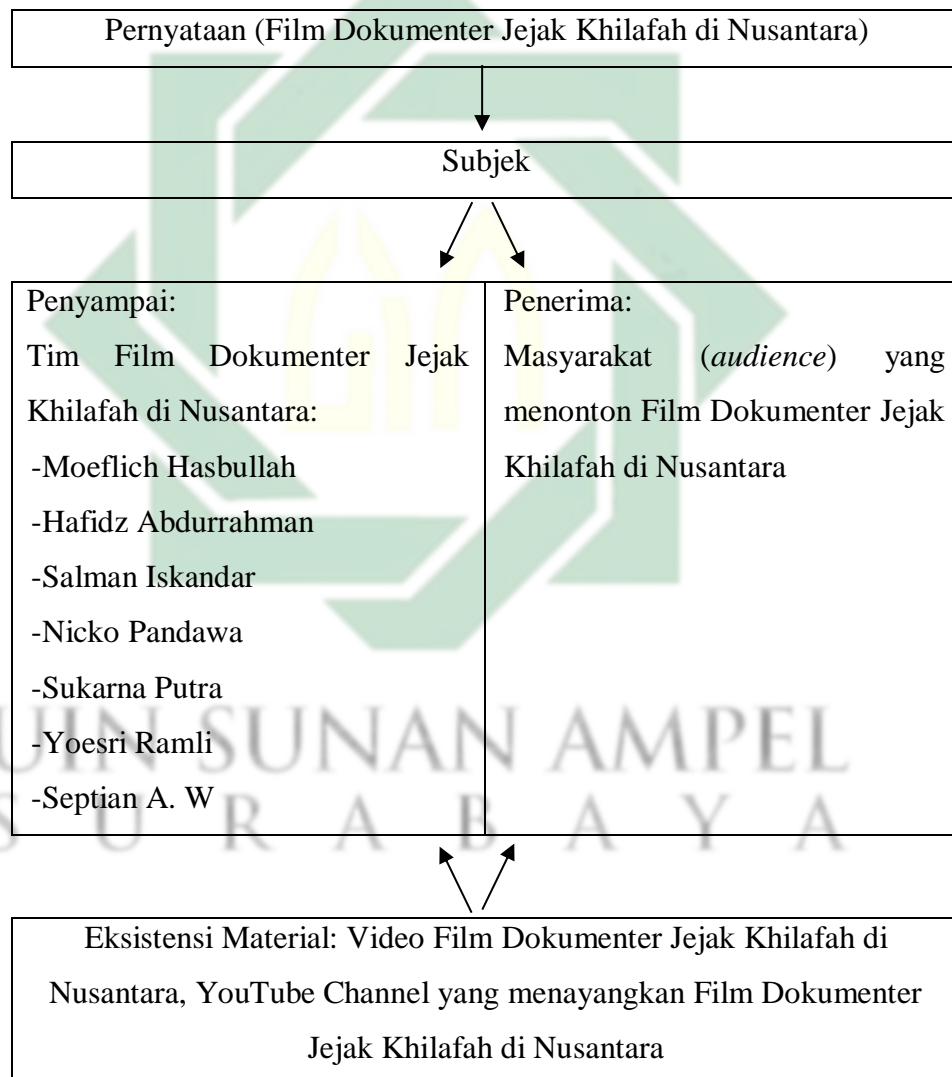


Diagram di atas merupakan identifikasi masing-masing elemen arkeologi terhadap film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara sebagai pernyataan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam

film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara menjadikan film ini bukan hanya berada dalam diskursus sejarah tetapi juga menjadikan film ini berada dalam diskursus politik.

Sedangkan pernyataan Peter Carey berada dalam diskursus apa, akan dijelaskan pertama-tama melalui identifikasi elemen arkeologi melalui diagram berikut:

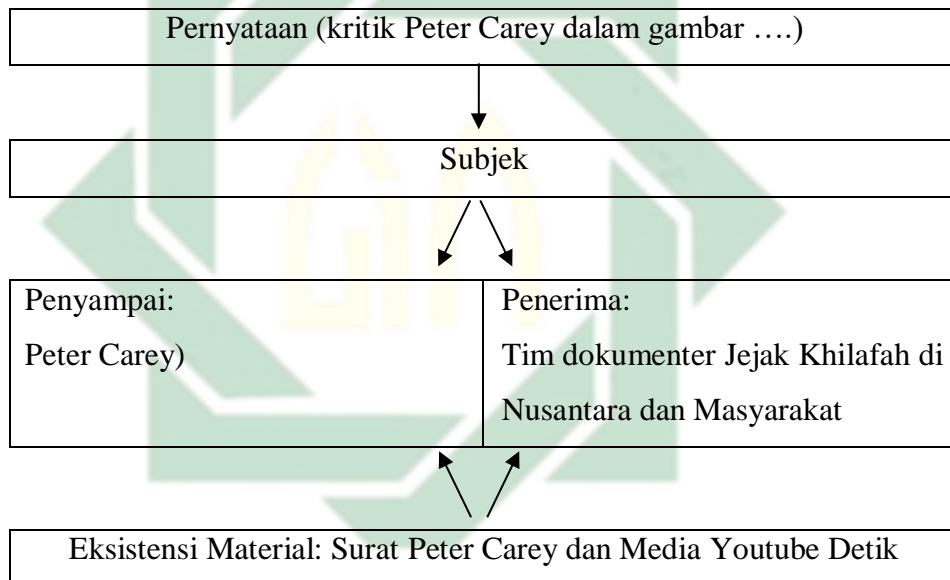


Diagram tersebut menjelaskan diskursus yang terbentuk dalam pernyataan kritik Peter Carey merupakan diskursus sejarah, didukung dengan latar belakang Peter Carey sebagai subjek penyampai kritik.

Kemudian menjadi jelas kedua pernyataan tersebut berada dalam diskursus yang berbeda. Hal yang dispesialisasi dari kedua diskursus tersebut selanjutnya adalah bagaimana keberadaan keduanya sebagai praktek metode tertentu. Keberadaan kedua diskursus yang berada di

dalam diskursus sejarah, memungkinkan penulis mengetahui, bahwa film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara dan pernyataan Peter Carey yang menanggapinya –keduanya– merupakan praktek dari metode sejarah.

Metode sejarah setidaknya tidak mengabaikan tiga tahap berikut dalam prosesnya, yaitu *pertama*, pencarian bahan-bahan sumber atau yang bisa disebut dengan tahap *heuristik*. *Kedua*, dilakukan pengujian atau penilaian terhadap bahan-bahan sumber yang diperoleh dari tahap *heuristik* dari sudut pandang realitas atau nilai kebenarannya sebagai kenyataan, tahap ini disebut dengan kritisisme. Dilakukan dengan mempertanyakan kembali, meragukan dan memberi kesangsian. Tahap ini penting untuk meningkatkan mutu kebenaran sejarah. *Ketiga*, penceritaan atau penyajian baik lisan maupun tertulis yang harus tetap berada dalam batas kebenaran objektif baik dari segi arti maupun makna. Tahap ini disebut tahap *sinthese*.<sup>66</sup>

Memanggil kembali pembahasan dalam film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara yang mendapat kritikan khusus dari Peter Carey mengenai penggunaan gelar atau judul oleh Pangeran Diponegoro. Bahwa pada saat wawancara antara tim Komunitas Literasi Islam yang kemudian berada di balik pembuatan Film Jejak Khilafah di Nusantara. Dalam wawancara tersebut terdapat pembicaraan mengenai judul yang digunakan Pangeran Diponegoro yang memang mengandung unsur khilafah dan

---

<sup>66</sup> Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama: 2018), 12

beberapa kalimat dalam bahasa Arab, juga menyebutkan tentang gelar yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro untuk komandan yaitu Ali Basah.

Dalam salah satu karyanya, Peter Carey menjelaskan bahwa gelar ini digunakan pada Perang Jawa (1825-1830) untuk menyebut pemimpin senior pasukan Pangeran Diponegoro. Dalam karya tersebut memang disebutkan bahwa gelar Ali Basah tersebut diambil dari Kesultanan Turki Utsmani yang memberikan gelar “Pasha” untuk pejabat tinggi militer dan sipil seperti gubernur, jenderal dan menteri. Pengambilan gelar inipun digunakan oleh Pangeran Diponegoro setelah dia mengetahuinya dari para penasihatnya seperti Haji Baharudin.<sup>67</sup>

Namun, sebagaimana bantahan Peter Carey yang disebutkan dalam salah satu wawancara klarifikasinya dengan tim blak-blakan detikcom bahwa hal ini hanya menunjukkan adanya rasa kekaguman Pangeran Diponegoro terhadap kesultanan Turki Utsmani, tidak menunjukkan adanya hubungan khusus di antara keduanya dan tidak ada arsip yang mendukung bahwa hal tersebut benar.

“Maka, hasil pembacaan saya mengenai babad autobiografi karya Diponegoro sendiri menunjukkan dengan jelas bahwa sementara dia sangat tertarik dan mengagumi Kesultanan Utsmaniyah - dan memang mengambil nama sang Sultan Utsmani, Sultan Abdulhamid I (bertakhta 1774-89), yang membangkitkan kembali

---

<sup>67</sup> Peter Carey, *Sisi Lain Diponegoro: Babad kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa* (Jakarta: Kepustakaan Poulter Gramedia, 2017), 258

gagasan mengenai Sultan Utsmaniyah sebagai pelindung umat muslim di keseluruhan umma' internasional, secara pribadi dia sendiri tidak mengetahui ataupun tertarik akan kebangkitan kembali khalifah, dan tidak tahu secara mendetail tentang pemerintahan Utsmaniyah ataupun kebijakan politik sambil mengandalkan penasihat rohaninya”.

Sebagaimana dikutip oleh Peter Carey dalam salah satu bukunya, perkataan seorang ahli Islam Indonesia dari ANU; Profesor Anthony Johns. Peter Carey mengutip Johns bahwa menelusuri sejarah harus sesuai dengan konsep sejarah;

“tidak boleh dipaksakan dari luar, melainkan harus dilandasi oleh ciri kebudayaan masyarakat yang sedang dipelajari.”<sup>68</sup>

Beberapa pernyataan lain dari kritik Peter Carey yang menjadi sorotan adalah mengenai kebenaran sejarah dan arsip pernyataan dalam Film Jejak Khilafah Nusantara mengenai kedudukan Raden Patah yang dikatakan memiliki kontak dengan Kesultanan Turki Usmani, bahkan hingga Raden Patah melakukan futuhat terhadap Jawa menjadi Darul Islam. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan dalam kritik Peter Carey. Dengan mencari terkait bukti dan arsip sejarah dan melakukan *check* kepada Ismail Kadi yang merupakan sejarawan Turki, Peter Carey mendapatkan jawaban bahwa tidak ada kontak yang terjadi antara Raden Patah dengan Turki Usmani.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Peter Carey, *Sisi Lain Diponegoro.*, 1

<sup>69</sup> Blak-blakan Peter Carey; Jejak Khilafah Itu Propaganda, Bukan Sejarah. Lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=Sa3JVSGH3F0>, diakses pada 1 Januari 2022



Film dokumenter *Jejak Khilafah di Nusantara* menggunakan metode sejarah dalam hampir seluruh prosesnya. Fenomena dan gambaran eksternal secara umum melihat film dokumenter ini sebagai fakta-fakta sejarah yang menjelaskan secara runtut bagaimana khilafah Islam secara periodik dan memiliki keterkaitan sejarah dengan nusantara. Namun, tokoh pembicara dalam film dokumenter ini kemudian memperlihatkan sisi ke-subjektif-an film, lantaran tokoh-tokoh tersebut adalah yang telah lama dari sebelumnya merupakan aktivis organisasi Islam Politik. Ini menunjukkan ada keluputan dalam proses praktek metode sejarah bagian kritisisme. Dalam tahap ini seharusnya sejarah bersama dengan fakta-fakta yang ada kembali dipertanyakan untuk meningkatkan mutu kebenaran sejarah dan menghindari sejarah yang bias dominasi dan kuasa.

### **B. Analisis Genealogis Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan Dalam Film *Jejak Khilafah Di Nusantara***

Pada analisis data ini peneliti akan membahas mengenai narasi yang mengandung kontroversi dalam Film *Jejak Khilafah di Nusantara* yang diambil untuk dijadikan bahan penelitian dengan menggunakan teori genealogi kekuasaan Michel Foucault yang menjelaskan tentang sistem pemaknaan semacam sejarah yang didalamnya terdapat menceritakan terbentuknya macam macam pengetahuan, baik itu tentang subjek maupun objek-objeknya. Disini penulis menggunakan metode genealogi kekuasaan Michel Foucault sebagai landasan berfikir untuk membuka relasi kuasa-pengetahuan dibalik wacana publik.



Dalam menganalisis sebuah narasi terdapat tiga cara konsep genealogi kekuasaan, yaitu *ursprung*, *herkunft*, dan *eststechung*. *Ursprung* mempunyai pengertian sebagai upaya mencari asal muasal dengan cara menguji asal-muasal dari munculnya suatu peristiwa. Akan tetapi Michel Foucault disini tidak menggunakan genealoginya dalam pengertiannya sebagai *ursprung*, dikarenakan begitu ada banyaknya kelemahan didalamnya. Adapun salah satu kelemahannya adalah selalu berusaha mencari kemungkinan yang paling murni dari asal muasal supaya bisa mengetahui identitasnya secara cermat, hal inilah dirasa terlalu muluk untuk dipraktekkan. Sedangkan *herkunft* merupakan cara untuk mengetahui bagaimana asal muasal yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi terjadinya penyimpangan waktu, kekeliruan, musibah yang dibiarkan muncul pada semua hal yang eksis dan bernilai bagi manusia.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan cara terakhir yakni *eststechung* yang merupakan suatu cara untuk mengetahui asal-muasal suatu peristiwa namun dengan jalan yang berbeda. Konsep *eststechung* mengajarkan untuk menyusun kembali sistem yang beranekaragam tentang subjek dan dominan yang terkandung dalam peristiwa tersebut.

Metode *eststechung* dalam analisisnya mengharuskan peneliti untuk mempunyai kemampuan dalam menunjukkan interaksi dan mencari pola perjuangan yang menjadi kekuatan untuk saling menentang dengan tujuan bisa mengungkap kekuatan yang tersembunyi dibalik suatu

peristiwa, sampai akhirnya peneliti mampu mengungkapkan suatu teks yang bisa menelanjangi dirinya sendiri sehingga semua relasi kuasa dan pengetahuan yang tersembunyi didalamnya akan dapat diketahui secara terbuka.

Sisi subjektifitas Film Jejak Khilafah di Nusantara membuka pintu analisis arkeologi pada tahap deskripsi otoritas pembatasan sekaligus menghubungkan pada analisa genealogi kekuasaan Michel Foucault. Genealogi merupakan metode Michel Foucault yang bertujuan untuk melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Jika pada metode arkeologi Foucault mengorganisir tentang wacana, data, atau dokumen, secara ringkasnya arkeologi melakukan analisis secara empiris terhadap suatu diskursus,<sup>70</sup> tugas genealogi adalah melakukan analisa kritis terhadap diskursus dan merelasikan suatu diskursus tersebut dengan isu-isu yang kontemporer.<sup>71</sup>

Metode Genealogi ditujukan untuk melawan penulisan sejarah dengan metode tradisional, genealogi bukan mencari tentang asal-usul akan tetapi mencari dan menelusuri awal dari pembentukan diskursus yang bisa terjadi kapan saja. Genealogi digunakan untuk menelaah cara sebuah diskursus yang berkembang yang dimainkan dalam kondisi historis yang spesifik dan tidak bisa direduksi melalui operasi kekuasaan. Oleh karena

---

<sup>70</sup> Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 1 (2012), 142

<sup>71</sup> Ketut Wiradnyana, *Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 28

itu genealogi harus menemukan hubungan kekuasaan yang bekerja dalam peristiwa tertentu, gerakan historis, dan sejarah itu sendiri.

Pembacaan terhadap naskah Skripsi Nicko T. Pandawa yang selanjutnya menjadi sumber dan inspirasi utama lahirnya film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara sebagai sumber pengetahuan tim eksekusi Film Jejak Khilafah di Nusantara. Pengetahuan ini berbanding lurus dengan latar belakang beberapa tokoh yang turut berkontribusi dalam agenda politik yang mencita-citakan berdirinya negara Islam atau khilafah di Indonesia. Bebetapa tokoh tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Moeflich Hasbullah adalah salah satu dosen UIN Sunan Gunung Djati. Moefloch Hasbullah merupakan pakar ahli sejarah yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia pada saat sidang pembubaran organisasi HTI.
2. Hafidz Abdurrahman merupakan penulis buku “Diskursus Islam Politik dan Spiritual” dan buku “Menggugat Bank Syariah: Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah”. Hafidz Abdurrahman kerap kali menjadi pembicara di channel YouTube bernama “Khilafah Channel”, dan kerap dijadikan rujukan dalam beberapa tulisan bertajuk khilafah di portal keislaman TintaSiyasi.com.
3. Salman Iskandar adalah seorang penulis buku. Salah satunya berjudul “99 Tokoh Muslim Indonesia”. Selain itu Salman Iskandar juga berkontribusi dalam penerbitan buku sejarah yang banyak dibaca kalangan mahasiswa; Api Sejarah sebagai editor.

4. Nicko Pandawa, Ia adalah sutradara langsung film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara. Selain itu, dia juga anggota dan penulis di Komunitas literasi Islam. Salah satu tulisannya berjudul “Ketika Snouck Hurgronje Menyabotase Surat untuk Khilafah”.
5. Sukarna Putra; Wakil Ketua CISAH (Center for Information of Sumatra Pasai Heritage).
6. Yoesri Ramli merupakan Sekjen Mapesa atau Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, dan
7. Septian A. W; Penulis buku Sejarah Komite Khilafah.

Berkaitan dengan konsep genealogi *eststechung*, jika dilihat dari latar belakang penutur, narasi dan pernyataan dalam film, tujuan yang ingin dicapai dalam film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara adalah tujuan politik. Terlihat bagaimana *sinthese* atau penceritaan para penutur dalam film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara lebih menonjolkan pembahasan ketatanegaraan, siasat politik dan pemerintahan saja. Beberapa wawancara narasumber dan hasil informasi dari wawancaranya pun disunting hingga mengubah alur dan argumentasi narasumber. Hal ini-lah yang kemudian membuka peluangnya celah pada salah satu elemen Film Jejak Khilafah di Nusantara sebagai suatu diskursus.

Berangkat dari fenomena tersebut, Peter Carey adalah elemen yang membantah Film Jejak Khilafah di Nusantara, metode penelusuran sejarahnya memiliki langkah berbeda dengan bersandarkan kepada

fakta baik yang berupa sumber tertulis seperti perpustakaan dan arsip, sumber lisan melalui wawancara pelaku sejarah atau saksi sejarah, dan sumber benda seperti di museum dan lapangan. Tujuan eksplorasinya lebih bersifat kaya untuk tujuan sejarah dan keilmuan. Hal ini menuntunnya kepada sikap kritisnya dengan mengedepankan bukti yang tidak mudah dibantah.

Pada beberapa poin keberatan yang disampaikan Peter Carey kepada Film Jejak Nusantara seharusnya justru bisa menjadi tahap kedua yaitu kritisisme untuk penelusuran Jejak Khilafah di Nusantara untuk membangun narasi sejarah yang lebih kuat. Namun, hal ini selanjutnya harus diikuti dengan proses pencarian bukti valid atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam film dokumenter. Ketiga tahap metode yang telah disebutkan penulis sebelumnya setidaknya harus terpenuhi sehingga tidak diragukan keabsahannya.

Genealogi kekuasaan Michel Foucault cenderung melihat realitas agama dalam dialektika akan paham-paham keagamaan. Hal ini terjadi karena perspektif dari pemikiran Michel Foucault selalu mencurigai doktrin agama yang serba kekuasaan, dimana setiap saat sebuah doktrin agama bisa digunakan sebagai alat untuk berbuat makar atau politik kekuasaan demi mencapai keuntungan yang sesaat.

Kita tahu bahwa upaya upaya yang dilakukan para kelompok pengusung ide khilafah saat ini memang bisa dilakukan dalam berbagai hal, salah satunya yakni dalam bentuk Film Jejak Khilafah di

Nusantara. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa yang mereka lakukan adalah dalam hal kekuasaan (politik). Doktrin doktrin yang berbentuk film inilah bisa dijadikan sebagai alat pelindung untuk meraih kekuasaan.

Hal inilah merupakan fenomena yang sering terjadi dalam politik Islam yang ada dalam negara Indonesia dan sesuai dengan penjelasan Michel Foucault yang menganggap bahwa kekuasaan atas agama bisa membuat penganutnya menjadi manusia yang jahat dan kejam karena mereka selalu melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan tujuan yang mereka inginkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua pembahasan yang sudah peneliti bahas dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Film Jejak Khilafah di Nusantara yang ditayangkan beberapa waktu lalu menuai berbagai reaksi. Beberapa orang pro terhadap isi film dan lainnya kontra. Golongan yang pro memiliki argumentasi bahwa terdapat hubungan secara tidak langsung antara kekhalifahan Turki Utsmani dengan beberapa kerajaan di Nusantara. Hubungan tersebut kemudian dicoba untuk dihidupkan kembali di masa sekarang dengan menyusun sejarah hubungan tersebut dalam bentuk film. Sedangkan golongan yang kontra memiliki argumentasi bahwa nilai kesejarahan yang melatarbelakangi hubungan antara kekhalifahan Turki Utsmani dengan kerajaan di Nusantara dinilai terlalu berlebihan. Peter Carey selaku peneliti juga ikut berpendapat bahwa tidak benar-benar ada hubungan yang jelas antara Nusantara dengan Turki Utsmani. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa tidak terdapat bantuan perang saat Nusantara masih dalam kekuasaan dagang Portugis dan saat penjajahan Belanda. Hubungan antara Turki Utsmani dengan Nusantara hanya sebatas dalam penyebaran agama Islam, bukan dalam perjanjian antar penguasa. Maka dari itu Film Jejak Khilafah di Nusantara pun ditangkap oleh sejarawan Profesor Peter Carey

sebagai sebuah khayalan. Film ini disebut lebih mendekati sebuah khayalan karena tidak berdasarkan arsip dan hanya untuk kepentingan propaganda ketimbang dokumenter, yakni agenda dan proyek HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang berupaya untuk mengarang sebuah narasi sejarah yang tidak berdasarkan dan didukung oleh kenyataan.

2. Genealogi kekuasaan Michel Foucault mempunyai tiga pengertian yakni *ursprung*, *herkunft*, dan *estechung*. Penulis disini menggunakan konsep genealogi *eststechung*, yakni mengajarkan untuk menyusun kembali sistem yang beranekaragam tentang subjek dan dominan yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Karena jika dilihat dari latar belakang penutur, narasi dan pernyataan dalam film, tujuan yang ingin dicapai dalam film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara adalah tujuan politik. Terlihat bagaimana metode sejarah yang berupa *sinthese* atau penceritaan para penutur dalam film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara itu lebih menonjolkan pembahasan ketatanegaraan, siasat politik dan pemerintahan saja. Film Jejak Khilafah di Nusantara yang dibedah dengan mempergunakan teori genealogi kekuasaan Michel Foucault menunjukkan fakta bahwa terdapat berbagai kepentingan dalam film tersebut, mulai dari isi film, pembuatan, hingga para aktor yang tampil memberikan dukungan. Kepentingan inilah yang kemudian menjadi alasan atas adanya pro dan kontra yang timbul pasca penayangan film.



Kepentingan ini juga yang membuat isi film menjadi bias makna, serta menimbulkan kekeliruan pemahaman bagi siapapun yang melihatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pembaca ataupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Di zaman teknologi yang maju sekarang, kita sebagai pengguna dan penikmat media sosial harus bisa cerdas dalam memilih dan memilah narasi yang baik dan tidak baik maupun benar dan tidak benar, baik itu berupa teks, video atau gambar visual yang memiliki nilai pesan yang beragam dan bisa menyebabkan perkembangan kita pada masa yang akan datang terganggu.
2. Adanya penulisan skripsi ini, peneliti berharap bisa menghadirkan pengetahuan secara lebih luas dan benar, baik melalui generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Tujuannya supaya generasi yang akan datang tidak menjadi generasi yang buta akan sejarah dan pengetahuannya.
3. Bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan ajakan yang mengatasnamakan Islam. karena apabila dalam ajakan tersebut yang sifatnya merusak dan makar, maka harus bisa mempertimbangkan dengan akal sehat. Karena agama bisa dijadikan sebagai alat untuk meraih keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfathoni, Muhammad Ali Mursid dan Dani Manesah. *Pengantar Teori Film*. Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020.
- Carey, Peter. *Kesatria dan Santri: Beberapa Catatan Tentang Hubungan Pendukung Keraton and Agamawi Diponegoro, Dari Babad dan Hikayat sampai sejarah Kritis*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1987.
- Carey, Peter. *Sisi Lain Diponegoro: Babad kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*. Jakarta, Kepustakaan Pouler Gramedia, 2017.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Fachrudin, Andi. *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*. Jakarta, kencana, 2012.
- Fillingham, Lydia Alix, *Foucault*. Yogyakarta, Kanisius, 2005.
- Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta, IRCiSoD, 2012.
- Ghofar, Muhammad Azizul. *Salah Kaprah Khilafah*. Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2015.
- Hardiyanta, P. Sunu, *Michel Foucault: Disiplin Tubuh*. Yogyakarta, Bengkel Individu Modern LKis, 1997.
- Iryana, Wahyu. *Historiografi Barat*. Bandung, Humaniora, 2014.
- Kali, Ampy. *Diskursus Seksualitas*. Yogyakarta, LEDALERO, 2013.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Malang: Indonesiatara, 2001), 30

- Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Lexy, Moleong J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mabruri, Anton. *Manajemen Produksi Program Acara Televisi Format Acara Drama*. Jakarta, PT. Grasindo, 2013.
- Malaky, Ekky Al. *Remaja Doyan Nonton: Seri Penuntun Remaja*. Bandung, DAR Mizan, 2004.
- Nadirsyah, *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*, Jilid I, Cet. 3 (SUKA PRESS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2018), 169
- Rani, Abdul. dkk. *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Sen, Krishna. *Kuasa Dalam Sinema: Negara, Masyarakat, dan Sinema Orde Baru*. Yogyakarta, Ombak, 2009.
- Sugono, Dendi. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Gramedia, 2008.
- Wahyuningsih, Sri. *Film dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-pesan Dakwah dalam Film Melalui Analisis Semiotik*. Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta, Magmun Pustaka Utama, 2018.
- Wiradnyana, Ketut. *Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

## Jurnal

- Adlin, Alfathri. "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia". *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol.1 No. 1, 2016.
- Afandi, Abdullah Khozin. "Konsep Kekuasaan Michel Foucault". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 1, 2012.
- Ahmad, Amar. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar revolusi dan Berbagai Standardnya". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012.
- Al Amin, Ainur Rofiq. "Konstruksi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir", *Jurnal Review Politik*, Vol. 07, No. 02, 2017.
- Asri, Rahman. "Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 1, No.2, Agustus 2020.
- Baidhowi, "Khilafah Dalam Konteks Negara Pancasila", *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2016), 498
- Hakim, Luqman Abdul. "Menerawang Masa Lalu Di Era Digital: Film Sejarah Vis A Vis Historiografi". *Sasdaya: Gajah Mada Journal Of Humanities*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019.
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik". *Jurnal al-Khitabah*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, 2013.
- Mudjiono, Yoyon. "Kajian Semiotika dalam Film". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.1, April 2011.
- Ningsih, Bekti Marga dan Chr. Argo Widiharto. "Peningkatan Disiplin Siswa dengan Layanan Informasi Media Film". *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014.

Pranowo, Yogie. "Genealogi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan". *Melintas: An International Journal of Philosophy and Religion*, Vol. 33, No. 3, 2016.

Sanusi, Irfan. "Membedah Diskursus Dan Berkreasi Dalam Ranah Pluralitas: Rereading Arkeologi Pengetahuan". *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 15, Januari-Juni 2010.

Syahputra, Iswandi. "Pos Media Literacy; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault". *Jurnal ASPIKOM*, Vol.1, No.1, Juli 2010.

Tanjung, Indra Utama. "Studi Komparatif Pendirian Negara Khilafah di Indonesia". *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 1, 2018.

### **Skripsi**

Ihsaniah, Ihda Roudhotul, "Konsep Khilafah dan Nation State Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia"—(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 20

Maulidar. "Film Dokumenter Sebagai Media Dakwah Studi Pada Film Dodaidi", Skripsi—(Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Ar – Raniry Banda Aceh, 2018).

### **Website**

"Digging Up the Truth" Melalui Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.muslimahnews.com/2020/08/20/digging-up-the-truth-melalui-film-jejak-khilafah-di-nusantara/>. Diakses pada 13 Agustus 2021.

Anwar, Muhammad Hamid, "Nalar Kuasa di Balik Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif Arkeologi dan Genealogi Michel Foucault", lihat dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-muhammad-hamid-anwar-m-phil/penjas-dalam-perspektif-faucoult.pdf>. Diakses pada 19 Juli 2021.

Bantahan Pakar Atas Klaim Film Jejak Khilafah di Nusantar, lihat dalam <https://www.republika.co.id/berita/qfd5bz320/bantahan-pakar->

[atas-klaim-film-jejak-khilafah-di-nusantara](#). Diakses pada 20 September 2021.

Blak-blakan Peter Carey: Jejak Khilafah Itu Propaganda Bukan Sejarah!, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=Sa3JVSGH3F0>. Diakses pada 3 November 2021.

Dosa Besar Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=IeGrIjaRK8c>. Diakses pada 13 Januari 2022

Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WQW0D3vLR4g&t=713s>. Di akses pada 3 September 2021.

Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WQW0D3vLR4g&t=713s>. Di akses pada 3 September 2021.

Film Jejak Khilafah Diviralkan, Isinya Pun Disebut Khayalan, lihat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5151703/film-jejak-khilafah-diviralkan-isinya-pun-disebut-khayalan>. Diakses pada 4 Agustus 2021.

KH. Harun ArRasyid : Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=YoOfsVMzECo>. Diakses pada 12 Januari 2022

Khilafah di Nusantara, Benarkah Ada Jejaknya? - Dialog Sejarah | HISTORIA.ID, lihat dalam [https://www.youtube.com/watch?v=kB\\_vfw36ILw&t=660s](https://www.youtube.com/watch?v=kB_vfw36ILw&t=660s). Diakses pada 15 Januari 2022

Klaim Khilafah di Nusantara, Diponegoro Kontak Ottoman?, lihat dalam <https://www.republika.co.id/berita/qfdzll320/klaim-khilafah-di-nusantara-diponegoro-kontak-ottoman>. Diakses pada 27 Oktober 2021.

Namanya Dicatut dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara, Peter Carey Protes, lihat dalam <https://www.suara.com/news/2020/08/10/153240/namanya->

[dicatut-dalam-film-jejak-khilafah-di-nusantara-peter-carey-  
protes?page=all](#). Diakses pada 24 September 2021.

Talk Show Launching Film Jejak Khilafah di Nusantara, lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=xLvakK08o1c>. Diakses pada 12 Januari 2022



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A